KABUPATEN BOGOR
ISTIMEWA & GEMILANG
KUTA UDAYA WANGSA

RENCANA STRATEGIS DISDUKCAPIL TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dapat diselesaikan. Penyelesaian Rencana Strategis (Renstra) merupakan hasil kerja tim penyusun, yang dilaksanakan secara bersama-sama, untuk mendapatkan hasil rumusan rencana yang optimal sesuai dengan bidang tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

Penyusunan Rencana Strategis mendorong untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas program dan unggul serta melakukan perubahan kearah perbaikan dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Demikian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disusun sebagai bahan pedoman dan arah pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Bogor secara signifikan.

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

RENALDI YUSHAB FIANSYAH, S.SOS

Pembina Utama Muda

NIP. 196909061988031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 14
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktrur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14
2.1.2 Sumber Daya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 26
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 35
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 45
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 47
2.2.1 Permasalahan 47
2.2.2 Isu Strategis 49
BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR 53
3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029 53
3.2 Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029 54
3.3 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029 56
3.4 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 61

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 69

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 69

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 245

BAB V 248

PENUTUP 248

LAMPIRAN 249

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 36
TABEL 2. 2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 43
TABEL 2. 3 PERUMUSAN PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 47
TABEL 2. 4 KERTAS KERJA PERUMUSAN ISU STRATEGIS PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 50

TABEL 3. 1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029 55
TABEL 3. 2 ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 58
TABEL 3. 3 STRATEGI DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 62

TABEL 4. 1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2025-2029 78
TABEL 4. 2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2030 166
TABEL 4. 3 SUB KEGIATAN PRIORITAS YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029 230
TABEL 4. 4 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 246
TABEL 4. 5 INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 247

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan harus ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Penyusunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 137);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor beserta nomenklatur perubahannya dalam hal terjadi perubahan kebijakan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang perencanaan Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah penanggung jawab urusan perencanaan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

10. Rencana ...

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Sistem ...

19. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
20. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta analisis dan Profil pembangunan Daerah.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
24. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Daerah untuk mencapai tujuan.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan Daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran tiga tahunan dalam RPD melalui Program pembangunan Daerah tahunan.

BAB II ...

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Kedudukan Renstra PD adalah:

a. Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2030;
b. Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029; dan
c. Renstra PD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2025 dan Renja PD tahun 2026-2030;

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 5

(1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.

(2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan atau sebutan lainnya.

(3) Kepala Badan atau sebutan lainnya melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.

(4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan dari Kepala Badan atau sebutan lainnya.

(5) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 6

(1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.

(2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.

(3) Kepala Badan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB V ...

BAB V

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

(1) Renstra PD dapat diubah apabila terjadi perubahan pada RPJMD dan RKPD.

(2) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD.

(3) Tahapan penyusunan Renstra PD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra PD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BOGOR,

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 34

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, dengan tahapan:

(1) Persiapan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;
(2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029;

(3) Penyesuaian Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai hasil konsultasi publik RPJMD;
(4) Penyusunan Rancangan Renstra PD;
(5) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
(6) Verifikasi Rancangan Renstra PD;
(7) Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
(8) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029;
(9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
(10) Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 serta Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2026 sampai dengan 2030, sehingga sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan dapat terwujud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Disdukcapil Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.
26. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129)
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arahan bagi penyelenggaraan bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung pelaksanaan tahapan pertama perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bogor.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai tahun 2025 hingga tahun 2030;

2. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Disdukcapil Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Disamping itu, menjelaskan pula terkait alasan perubahan Renstra akibat Kebijakan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rensta Perangkat Daerah. Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai,

sedangkan tujuan adalah poin-poin rinci yang ingin dicapai dari perubahan Renstra ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen berdasarkan bab per bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktrur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi seluruh unsur struktural dan fungsional Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati terkait SOTK PD.

2.1.2 Sumber Daya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan :

Menguraikan pencapaian IKU dan IKK PD sampai dengan Tahun 2024, rincian pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta

menyebutkan mana yang tercapai, yang melampaui target dengan alasan, serta yang tidak tercapai dengan alasan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Menguraikan pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kewenangan Perangkat Daerah, apa saja yang dilayani berdasarkan kelompk sasaran.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Menguraikan permasalahan PD yang masih belum bisa diselesaikan hingga tahun 2024, berupa:

a. Belum tercapainya target, dan penyebabnya;
b. Permasalahan kekinian yang muncul;
c. Permasalahan belum terlaksananya kewenangan;
d. Permasalahan belum terlaksananya mandatoty kebijakan pusat dan provinsi jabar;
e. Permaslahan yang terkait dengan hasil evaluasi KLHS;
f. Permasalahan lainnya yang perlu diuraikan.

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis yang berdampak pada pelaksanaan kewenangan PD yang berpengaruh pada kinerja PD. Isu strategis yang berdampak pada pelaksanaan kewenangan PD yang berpengaruh pada kinerja PD. Isu Strategis disajikan dalam lingkup isu Internasional, Regional, Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, serta isu yang berasal dari masukan DPRD. Isu strategis juga disajikan dengan menganalisis

potensi daerah yang akan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pelayanan PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029

Tujuan diturunkan dari Sasaran daerah yang diampu oleh PD sesuai dengan kewenangan dan NSPK. Perangkat Daerah dengan >1 bidang urusan, hanya tetap memiliki 1 tujuan, dengan menghimpun kewenangan yang ada.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029

Sasaran merupakan kinerja yang diturunkan dari tujuan PD, dengan memperhatikan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

3.3 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

Menguraikan langkah konkrit pencapaian tujuan dan sasaran PD, yang sesuai dengan NSPK dan kewenangan PD, serta selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD.

3.4 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Strategi dibuat dalam bentuk penahapan, dimana penahapan merupakan rincian prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam sub bab ini diuraikan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan mempertimbangkan SDM, fokus dan pentahapan (waktu/tahun

pelaksanaan), sehingga bisa terimplementasi dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4.1 Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

Menguraikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator, target kinerja serta kebutuhan anggaran tahun rencana (2025-2030). Program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIPD, serta digunakan berdasarkan cascading, mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output (kinerja).

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

IKU yang disajikan adalah IKU tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. IKK merupakan kinerja yang dibutuhkan untuk pencapaian kienrja bidang urusan (outcome program dan output kegiatan). IKK dapat mengakomodir kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tindak lanjut substansi Rensta untuk pedoman penjabaran Renja mulai tahun 2025-2030. Bab penutup ditandatangani oleh Bupati Bogor.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktrur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas perbantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;
c. Pengelolaan keuangan; dan
d. Pengelolaan situs web.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

a) Sub Koordinator Program dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1) Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2) Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
3) Pengelolaan penyusunan anggaran; dan
4) Pengelolaan situs web.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1) Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
2) Pengelolaan barang/jasa;
3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; dan
4) Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian.

c) Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1) Penatausahaan keuangan; dan

2) Penyusunan pelaporan keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bidang Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan sistem informasi kependudukan; dan
b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
c. Penyusunan rencana kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk mengacu pada rencana strategis dinas;
d. Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk;
e. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
f. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
g. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
h. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
i. Pelaksanaan pendataan dan pengendalian penduduk non permanen.
j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penertiban dokumen kependudukan.
k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:

a) **Sub Koordinator Identitas Penduduk** yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

Seksi Identitas Penduduk mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja seksi Identitas Penduduk mengacu pada rencana kerja bidang pelayanan Pendaftaran penduduk;
2) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan;
4) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
5) Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan;
6) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Asing (WNA);
7) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk;
8) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk;
9) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk;
10) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi identitas penduduk; dan
11) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam Melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi terkait pelayanan pindah datang penduduk dan pelaksanaaan pendataan penduduk.

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mengacu pada rencana kerja bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pendataan, pengendalian dan pindah datang penduduk;

3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pendataan, pengendalian dan pindah datang penduduk;
4) Pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pindah datang penduduk;
6) Pelaksanaan pendataan dan pengendalian penduduk;
7) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendataan, pengendalian dan pindah datang penduduk;
8) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendataan, pengendalian dan pelayanan pindah datang penduduk;
9) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendataan, pengendalian dan pelayanan pindah datang penduduk;
10) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk; dan
11) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

4. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengacu pada rencana strategis dinas;
2) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
4) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;

7) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencatatan sipil; dan
8) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:

a) Sub Koordinator Administrasi Kelahiran dan Kematian yang mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.

Seksi Administrasi Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana kerja seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mengacu pada rencana kerja bidang pelayanan pencatatan sipil;
2) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pencatatan kelahiran dan kematian;
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
4) Pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
5) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan kelahiran dan kematian;
6) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi kelahiran dan kematian;
7) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi kelahiran dan kematian;
8) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi pencatatan kelahiran dan kematian; dan;
9) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Koordinator Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan status anak dan Pewarganegaraan yang mempunyai tugas

membantu Kepala Bagian Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam Melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan Perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.

Seksi pencatatan Perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana kerja seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mengacu pada rencana kerja bidang pelayanan pencatatan sipil;
2) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
4) Pelaksanaan pelayanan pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
5) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
6) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
7) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
8) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan; dan
9) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

5. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
d. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

a) Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam Melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia..

Seksi Dokumentasi mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana kerja seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengacu pada rencana kerja bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

2) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis tata kelola infrastruktur, jaringan komunikasi data dan sumber daya manusia teknologi informasi;
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi tata kelola infrastruktur, jaringan komunikasi data;
4) Pelaksanaan Tata kelola dan pemeliharaan Infrastruktur dan jaringan komunikasi data;
5) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
6) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan tata kelola infrastruktur, jaringan komunikasi data dan sumber daya manusia teknologi informasi;
7) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis tata kelola infrastruktur, jaringan komunikasi data dan sumber daya manusia teknologi informasi;
8) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
9) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Koordinator Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana kerja seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan mengacu pada rencana kerja bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
2) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian database kependudukan;
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian database kependudukan;
4) Pelaksanaan pengembangan aplikasi dan pengolahan database kependudukan;

5) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan aplikasi dan pengolahan database kependudukan;
6) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan aplikasi dan pengolahan database kependudukan;
7) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
8) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

6. BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
b. Perumusan kebijakan teknis Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
d. Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

a) **Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Seksi Dokumentasi mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana kerja seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mengacu pada rencana kerja bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan;
2) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
4) Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
5) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
6) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
7) Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyelenggaraan penyimpanan dokumen arsip kependudukan dan catatan sipil;
8) Penyelenggaraan penyimpanan dokumen arsip kependudukan dan catatan sipil;
9) Penyelenggaraan penataan dokumen arsip kependudukan dan catatan sipil;
10) Penyusunan petunjuk teknis penyimpanan dokumen arsip kependudukan dan catatan sipil;
11) Penyelenggaraan legalisasi dan Kutipan Kedua akta catatan sipil.
12) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
13) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) **Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan** mempunyai tugas membantu Kepala Bagian pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan dan pelaksanaaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana kerja seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mengacu pada rencana kerja bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan;
2) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan;
3) Pelaksanaan koordinasi Kerjasama antar instansi dan Inovasi Pelayanan Kependudukan;
4) Pelaksanaan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan;
5) Pelaksanaan penyuluhan informasi program dan kegiatan penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil;
6) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Kerjasama, Inovasi Pelayanan Kependudukan, dan penyuluhan informasi program dan kegiatan penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil;
7) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Kerjasama, Inovasi Pelayanan Kependudukan, dan penyuluhan informasi program dan kegiatan penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil;
8) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
9) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

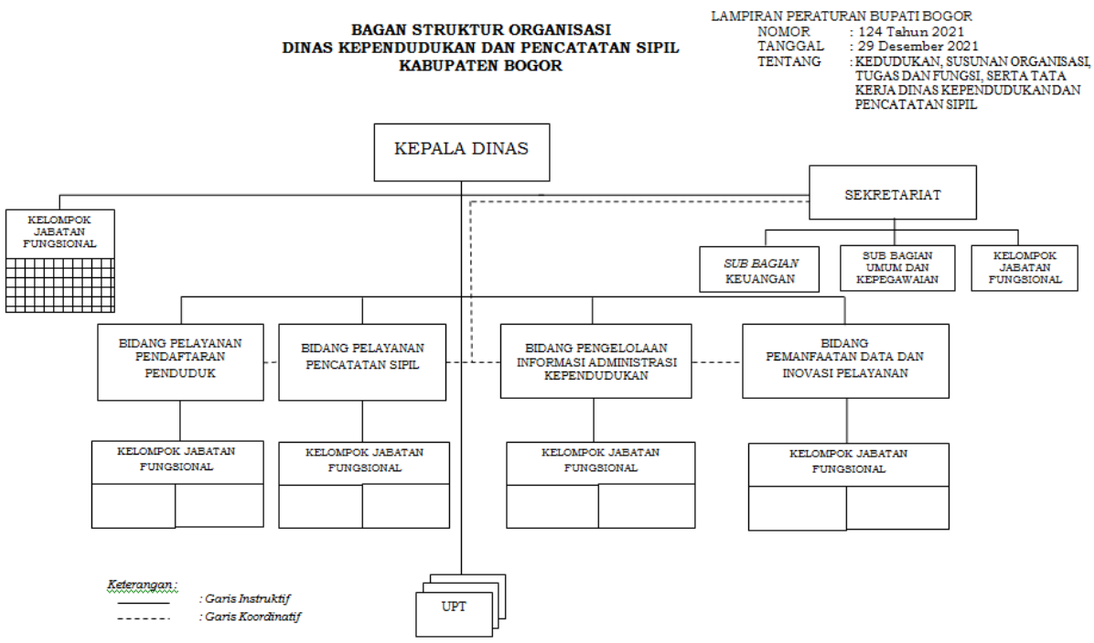
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

Nama dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

2.1.2 Sumber Daya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kondisi Umum Pegawai

   Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebanyak 323 orang yang terdiri dari PNS 80 orang, PPPK 26 orang dan 217 Tenaga honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	80	25
2.	PPPK	26	8
3.	KONTRAK/HONORER	217	67
	JUMLAH	323	100

Tabel 2.1.1

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil, 2025

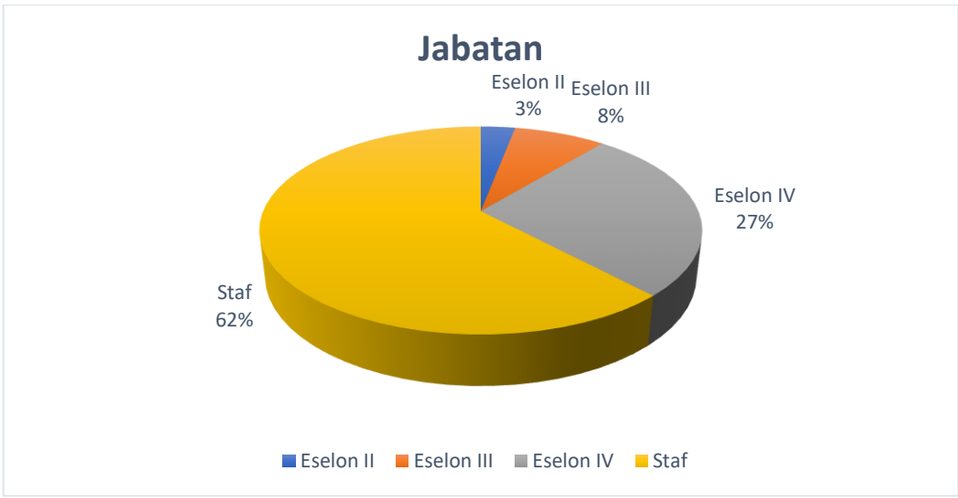
Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS sebanyak 80 orang.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari eselon II,III,IV,IVa dan IVb yaitu sebanyak 30 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	5	5
3.	Eselon IV	12	11
4	Eselon IVa	7	6
5	Eselon IVb	5	5
6	Pelaksana	76	72
	Jumlah	106	100

Tabel 2.1.2
Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menduduki Jabatan dan Staf, tahun 2025



Gambar 2.1.2
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

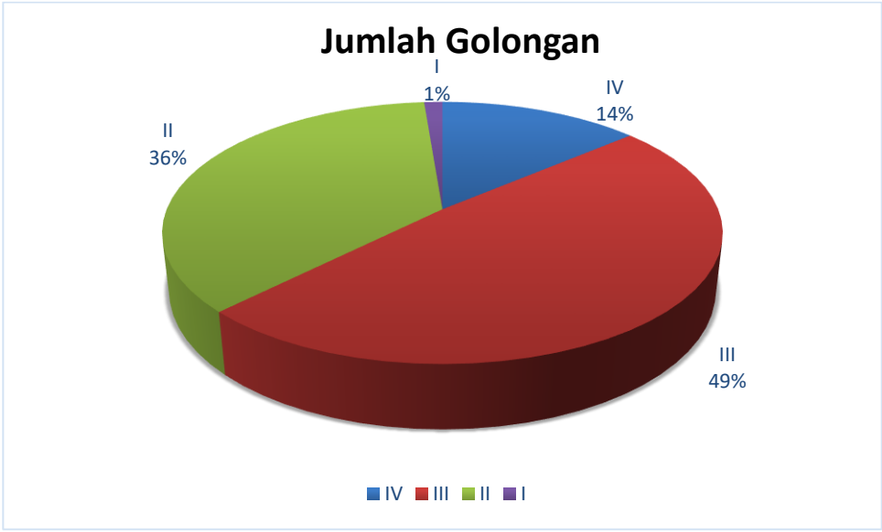
Sumber : Hasil Olahan Disdukcapil, 2025

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 80 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pegawai yang berstatus golongan IV sebanyak 11 orang (14%), golongan III sebanyak 39 orang (49%), sedangkan golongan II sebanyak 29 orang (36%) Namun masih ada pegawai yang berstatus golongan I sebanyak 1 orang (1%). Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut

No	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	11	14
2.	III	39	49
3.	II	29	36
4	I	1	1
	Jumlah	80	100

Tabel 2.1.3
Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025



Gambar 2.1.3

Proporsi Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024

Sumber : Hasil Olahan Disdukcapil, 2025

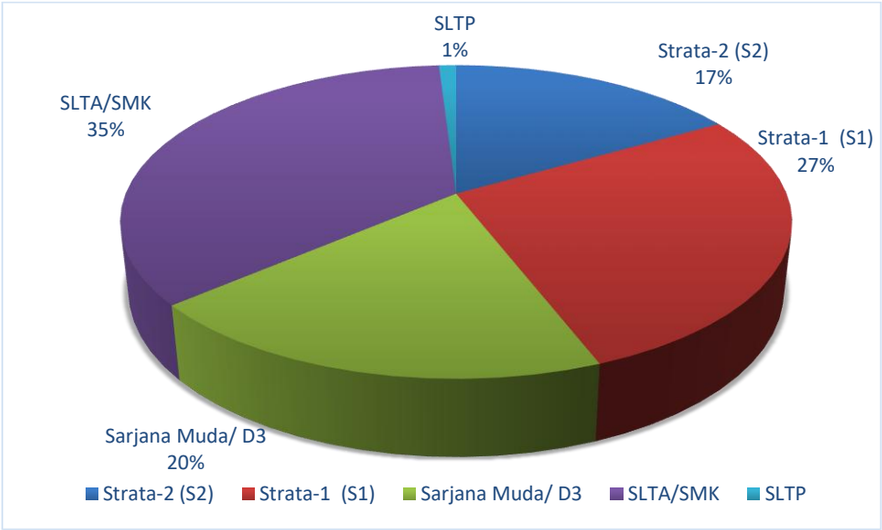
c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA lebih mendominasi yaitu sebesar 35%, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTP 1%. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	17	17
2	Strata-1 (S1)	28	27
3.	Sarjana Muda/ D3	20	20
4.	SLTA/SMK	36	35
5.	SLTP	1	1
	Jumlah	102	100

Tabel 2.1.4

Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Pendidikan tahun 2024



Gambar 2.1.4
Proporsi Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Sumber : Hasil Olahan Disdukcapil, 2025

Berdasarkan Gambar diatas menunjukkan bahwa pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 64% dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

d. Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari pendidikan/disiplin ilmu, terdapat 17 % pegawai dengan tingkat pendidikan strata-2 terbagi dalam 8 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 28 % yang terdiri dari 17 jenis disiplin ilmu. Sedangkan Ilmu Manajemen Keuangan hanya 1 % dengan latar belakang sarjana muda. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

NO		KESARJANAAN/ DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
A.	DOKTOR		-
B.	MAGISTER		18
	1	Ilmu Administrasi	4
	2	Administrasi Publik	1
	3	Administrasi Negara	1
	4	Manajemen	6
	5	Manajemen Administrasi	1
	6	Manajemen Administrasi	1
	7	Sains	3
C.	SARJANA		28
	1	Ilmu Pemerintahan	1
	2	Ilmu Administrasi	1
	3	Sosial	1
	4	Ilmu Hukum	2
	5	Komputer	3
	6	Pendidikan	1
	7	Ekonomi	2
	8	Ekonomi dan Bisnis	1
	9	Manajemen	3
	10	Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
	11	Akuntansi	1
	12	Asuransi syariah	1
	13	Ilmu Administrasi Negara	2
	14	Ilmu Administrasi Publik	1
	15	Manajemen ekonomi	4
	16	Manajemen ekonomi	1
	17	Hukum	1

NO		KESARJANAAN/ DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
	18	Teknik Informatika	1
D.	SARJANA MUDA		20
	1	Komputer	2
	2	Manajemen Informatika	5
	3	Ekonomi	1
	4	Manajemen Keuangan	1
	5	Sistem Informasi	5
	6	Teknik Informatika	1
	7	Teknik Komputer	4
	8	Teknologi Komputer	1
E.	SMA		36
F.	SMP		1
Jumlah			**102**

Tabel 2.1.5

Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pendidikan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor semakin berkualitas.

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tahun 2023-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan, semula pada tahun 2023 sebesar Rp 41.704.192.055,00 sementara pada

tahun 2024 menjadi Rp 51.140.588.626,00 atau naik sebesar 31.04 %.

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2024-2025, sebagai berikut :

TAHUN	ANGGARAN (RP)	REALISASI
2024	51.140.588.626	49.014.740.400
2025	80.752.567.175	16.559.943.953

Tabel 2.1.6
Anggaran Dan Realisasi Tahun 2024-2025

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di bawah ini :

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	TANAH	±3189	M2
2	GEDUNG	3 1306,2	UNIT (2 LANTAI)M2
3	LISTRIK	2	JARINGAN
4	AIR	1	JARINGAN
5	TELPON	1	LINE (1 FAX)
6	AREA PARKIR	1	AREA
7	RUANG RAPAT	2	RUANG
8	RUANG ARSIP	1	RUANG
9	KOPERASI	1	BUAH
10	TAMAN DALAM	-	AREA
11	KANTIN	1	BUAH
12	MUSHOLA	1	BUAH
13	KENDARAAN RODA 4	7	UNIT
14	KENDARAAN RODA 2	27	UNIT
15	MEJA RAPAT	11	SET
16	AC	40	UNIT
17	KOMPUTER PC	140	UNIT
18	KOMPUTER NOTEBOOK	45	UNIT
19	MEJA KERJA	173	UNIT
20	KURSI KERJA	243	UNIT
21	FILLING KABINET	38	UNIT
22	RAK ARSIP	73	UNIT
23	INFOKUS	2	UNIT
24	JARINGAN INTERNET	1	JARINGAN
25	BUKU PERPUSTAKAAN	-	BUAH
26	AREA TAMAN LUAR	1	AREA
27	LEMARI ARSIP	13	UNIT

Tabel 2.1.7
Sarana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dari tabel 2.1.7 dapat dilihat bahwa perbandingan antara luas gedung dan jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 47,5 M2 : 1, hal ini mengidikasikan bahwa setiap satu orang pegawai memiliki ruang sebanyak 47,5 M2.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan serta dukungan anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 2020-2024 disajikan pada tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Pendanaan, sebagai berikut :

TABEL 2. 1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15= 10/5 *100	16 = 11/6 *100	17 = 12/7 *100	18 = 13/8 * 100	19 = 14/9 *100
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	**Indikator Tujuan**																
1.1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	80,54					80,59					100				
		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Persen		68,39	73,11	79,45			78,63	72,75	73,63			115	99,51	92,66	
		Cakupan Layanan Adminduk	Persen					83,06					76,54					92,15
		Indikator Sasaran																

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan KTP	Persen	100					99,82					100				
1.1.2.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akte kelahiran anak	Persen	100					80,27					80				
		Persentase permohonan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan berbasis NIK	Persen	100					100					100				
		Perekaman ktp elektronik	Persen		100	100	100	98,43		100	99,12	99,99			100	99,12	99,99	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen		20	30	45	54,93		38,46	24,58	29,61			192	81,92	65,80	
		Kepemilikan akta kelahiran	Persen		85,18	89,33	93,36	95,81		97,44	94,56	91,28			114	105,85	97,77	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data	Persen		27,78	41,67	55,56	63,89		30,56	61,11	76,47			110	146,67	137,65	

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama																
		Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen					83,06					76,54					92,15
		Indeks Kepuasan Masyarakat	poin					82,00					86,98					106,07
		Indikator Program																
		Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk	Angka Rasio	1					1,00					100				
		Rasio bayi berakte kelahiran	Angka Rasio	1					0,80					80				
		Persentase Pengolahan NIK dan Biodata penduduk dalam SIAK	Persen	100					100					100				
		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melakukan Pemanfaatan Data dan Kerjasama Pelayanan kependudukan	Unit	8					8					100				
		Cakupan Jumlah Penduduk Pemohon Adminduk yang Terlayani	Persen	100					116,98					117				

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Cakupan penerbitan KTP	Persen		99,89	99,91	100			100	98,08	90,71			100	98,16	90,71	
		Cakupan perekaman data Biometrik	Persen		99,91	99,92	100			100	99,12	99,99			100	99,20	99,99	
		Cakupan penerbitan akte kelahiran anak	Persen		85,18	89,33	93,36			97,44	94,56	91,28			114	105,85	97,77	
		Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	Persen		100	100	100			100	100	100			100	100,00	100	
		Ketersediaan profil perkembangan kependudukan	Persen		100	100	100			100	100	100			100	100,00	100	
		Cakupan Penerbitan KTP	Persen		99,89	99,91	100	98,43		100	98,08	90,71	100,00		100	98,16	90,71	101,60
		Cakupan Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA	Persen		99,91	99,92	100	54,93		100	99,12	99,99	37,52		100	99,20	99,99	68,31
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Anak	Persen		85,18	89,33	93,36	95,81		97,44	94,56	91,28	92,11		114	105,85	97,77	96,14
		Persentase Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen					100					100					100,00

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Persen					65,71					82,35					125,33
		Persentase Penyajian Profil Kependudukan Yang Sesuai Dengan Pedoman Penyusunan	Persen					100					100					100,00

Sumber :

1. Perubahan Renstra Disdukcapil 2018-2023
2. Perubahan Renstra Disdukcapil 2024-2026
3. Hasil Audit Inspektorat
4. Hasil Evaluasi Kinerja

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan pencapaian atas program dan kegiatan pengawasan yang dilakukan.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan pada indikator tahun 2024 yaitu Cakupan Layanan Adminduk memperoleh capaian sebesar 92,15% dari target 83,06% dengan capaian realisasi sebesar 76,54% yang menandakan ketercapaian IKU masih belum tercapai dikarenakan masih adanya pengaruh dari rendahnya cakupan kepemilikan beberapa dokumen kependudukan yang disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera mengurus administrasi kependudukannya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Tahun 2024 juga dapat dilihat dari pencapaian kinerja sasaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dari rencana sebesar 83,06%, terealisasi sebesar 76,54% dengan tingkat capaian 92,15 yang menandakan ketercapaian IKU masih belum memenuhi target karena dikarenakan masih adanya pengaruh dari rendahnya tingkat persentase kepemilikan KIA dan cakupan akta kelahiran anak.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dari rencana sebesar 82 Poin, terealisasi sebesar 86,98 Poin dengan tingkat capaian 106,07% yang menandakan ketercapaian IKU sudah tercapai.

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan target kinerja program tahun 2024 terdapat enam (6) indikator utama yang menjadi nilai ukur, yaitu :

1. Cakupan Penerbitan KTP
2. Cakupan Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA

3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Anak
4. Persentase Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Kependudukan
5. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama
6. Persentase Penyajian Profil Kependudukan Yang Sesuai Dengan Pedoman Penyusunan

Sebagian besar indikator sudah mencapai target dengan rasio capaian diatas 100%, namun pada indikator Cakupan Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Anak masih belum mencapai target yaitu masing-masing diangka 68,31% dan 96,14%.

Pencapaian kinerja tersebut diatas didukung oleh adanya anggaran yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kegiatan. Adapun anggaran dan pendanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel 2.2

TABEL 2. 2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	6	8	9	10	10	12	13	14	14	15	16
PENDAPATAN															
- PAD															
BELANJA DAERAH	43.328.383.146	35.266.251.999	51.140.588.626	41.704.192.055	59.223.305.395	42.128.929.979	33.980.276.048	49.014.740.400	40.189.176.230					0,12	0,02
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG															
- BELANJA PEGAWAI	13.679.841.146					13.268.589.237				96,99					
B. BELANJA LANGSUNG															
- BELANJA PEGAWAI	124.054.000					102.859.000				82,91					
- BELANJA BARANG DAN JASA	28.390.321.000					27.700.751.082				97,57					
- BELANJA MODAL	1.134.167.000					1.056.730.660				93,17					

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	6	8	9	10	10	12	13	14	14	15	16
BELANJA OPERASI															
- BELANJA PEGAWAI		12.598.244.264	14.310.074.478	13.412.138.763	13.706.148.554		12.518.957.953	13.493.631.152	12.885.679.065		99,37	94,29	96,07		
- BELANJA BARANG DAN JASA		20.270.890.210	23.779.022.185	25.507.535.631	24.635.970.122		19.134.517.578	22.705.493.917	24.525.980.639		94,39	95,49	96,15		
BELANJA MODAL															
- BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN		895.073.850	8.114.846.563	2.784.517.661	19.416.047.639		850.223.000	8.072.020.025	2.777.516.526		94,99	99,47	99,75		
- BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN		1.502.043.675	4.936.645.400		1.465.139.080		1.476.577.517	4.743.595.306			98,30	96,09			

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat berdasarkan rasio antara realisasi dan anggaran bahwa pada tahun 2024-2026 pencapaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi karena presentase rasio berada diangka 90% ke atas di setiap tahunnya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

No	Urusan	Kelompok Sasaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan	DPRD Kabupaten Bogor	Koordinasi dalam kebijakan penganggaran dan perencanaan strategis pelayanan adminduk
2		Perangkat Daerah	Koordinasi dalam kerja sama pelayanan serta pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung program lintas sektor.
3		Desa dan Kelurahan	Koordinasi dalam pelayanan langsung ke masyarakat, pendataan peristiwa kependudukan (lahir, mati, pindah, datang), dan fasilitasi dokumen adminduk.
4		Instansi Swasta	Koordinasi dalam kerja sama pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pemberian layanan publik non pemerintah.
5		LSM dan Media	Koordinasi sebagai mitra pengawasan penyelenggaraan pelayanan adminduk kepada

No	Urusan	Kelompok Sasaran	Keterangan
			masyarakat, serta penyebarluasan informasi program kependudukan.
6		Masyarakat	Sebagai penerima manfaat utama layanan publik. Masyarakat menjadi kelompok sasaran utama dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

TABEL 2.1.8

DAFTAR URUSAN DAN KELOMPOK SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR

Macam pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu pelayanan dalam arti pelayanan masyarakat yang berupa pelayanan Akta-akta pencatatan sipil, pindah datang, pindah pergi penduduk dan sebagainya. Sedangkan macam pelayanan yang satu lagi merupakan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi SKPD dinas itu sendiri.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , antara lain meliputi :

1. Penerbitan KTP/KTP-el;
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
3. Penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan);
4. Penerbitan Akte Kelahiran;
5. Penerbitan Akte Kematian;
6. Penerbitan Akte Perkawinan dan Perceraian Non Muslim;
7. Pencatatan Pengangkatan, Pengesahan dan Pengakuan Anak;
8. Pencatatan Perubahan Nama;
9. Penerbitan KTP Orang Asing dan SKTT;
10. Pelayanan Surat Pindah Masuk/Keluar Penduduk;

11. Pelayanan verifikasi / validasi data ganda dan anomali;
12. Pelayanan Legalisir dokumen kependudukan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3:

TABEL 2. 3
PERUMUSAN PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URAIAN	PERMASALAHAN
Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Masih kurangnya inovasi layanan terkait pendaftaran penduduk
	Terbatasnya cakupan layanan pendaftaran penduduk
	Masih kurangnya kerjasama dan koordinasi antara Dinas dengan Kecamatan dan Desa terkait pelayanan pendaftaran penduduk
Peningkatan pelayanan terkait pencatatan sipil	Masih kurangnya inovasi layanan terkait pencatatan sipil
	Terbatasnya cakupan layanan pencatatan sipil
	Adanya hambatan waktu dan jarak tempuh dalam pengajuan penerbitan akta catatan sipil khususnya penduduk yang berdomisili di kecamatan yang jauh dari gedung kantor Dinas

URAIAN	PERMASALAHAN
Peningkatan pengolahan dan penyajian data kependudukan	Adanya penerapan SIAK Terpusat
	Pembatasan hak akses pemanfaatan data
Peningkatan pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan dengan instansi lain	Masih kurangnya sosialisasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait pemanfaatan data
Identifikasi berdasarkan hasil analisis KLHS	-
Identifikasi berdasarkan hasil penjaringan aspirasi oleh PD	-
Identifikasi faktor-faktor lainnya	Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemilikan dokumen kependudukan

Adapun permasalahan pokok terkait pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih perlunya peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik pada administrasi kependudukan, sehingga permasalahan tersebut melebar pada belum optimalnya pelayanan terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, belum optimalnya pengolahan dan penyajian data kependudukan serta masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan dengan instansi lain. Hal tersebut memunculkan akar masalah seperti masih kurangnya inovasi layanan terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terbatasnya cakupan layanan pendaftaran penduduk, masih kurangnya kerjasama dan koordinasi antara Dinas dengan Kecamatan dan Desa terkait pelayanan pendaftaran penduduk, adanya hambatan waktu dan jarak tempuh dalam pengajuan penerbitan akta

catatan sipil khususnya penduduk yang berdomisili di kecamatan yang jauh dari gedung kantor Dinas, adanya penerapan SIAK Terpusat, pembatasan hak akses pemanfaatan data dan masih kurangnya sosialisasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait pemanfaatan data. Serta faktor lainnya yang menjadi masalah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pemilikan dokumen kependudukan.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di lingkungan Kabupaten Bogor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor mempunyai tugas untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil secara operasional. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk merumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

TABEL 2. 4
KERTAS KERJA PERUMUSAN ISU STRATEGIS PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Jumlah penduduk kabupaten bogor yang menjadi salah satu kabupaten terbesar dalam skala nasional	Masih perlunya peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik di dalam Administrasi Kependudukan	Semakin tinggi kebutuhan perumahan semakin tinggi kebutuhan pemenuhan administrasi kependudukan	Target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tujuan ke-16 dan sasaran ke-9 tentang identitas hukum bagi semua warga semakin mendesak	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk pelayanan Publik	Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Optimalisasi Layanan Adminstrasi Kependudukan Berbasis Digital

Berdasarkan potensi daerah, Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar dalam skala nasional. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2025 sebesar 5.875.830 Jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 1.838.746 KK.

Kondisi ini memberikan tantangan besar kedepannya dimana proyeksi kebutuhan pemenuhan administrasi kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Bogor sangatlah tinggi. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih perlunya peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Dari sisi keberlanjutan lingkungan (KLHS), isu yang relevan adalah terkait alokasi lahan untuk pemukiman yang perlu mempertimbangkan kapasitas jasa lingkungan karena berdampak pada distribusi penduduk dan akses layanan dimana semakin tinggi kebutuhan perumahan maka semakin tinggi pula kebutuhan pemenuhan administrasi kependudukan.

Sementara itu, secara global, relevansi isu merujuk pada Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-16 dan sasaran ke-9, yaitu pemenuhan hak identitas hukum bagi semua penduduk. Pemenuhan identitas hukum berupa ktp elektronik misalnya, yang menjadi fokus utama dalam layanan dokumen kependudukan, tercatat jumlah wajib KTP-el di Kabupaten Bogor sebanyak 4.219.811 Jiwa. Isu ini menjadi semakin mendesak mengingat pentingnya identitas untuk akses layanan publik. Secara nasional, pentingnya pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama dengan instansi lain menjadi salah satu jembatan penting dalam integrasi layanan publik dimana saat ini sudah 16 Instansi yg melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu, DPMPTSP, KESBANGPOL, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, BPBD, DPKPP, Bappenda, DPMD, Dinas Pendidikan, DP2KBP3A, Diskominfo, Disnaker, Dinkes, Disdamkar, dan Dispora.

Di tingkat regional, diperlukan peningkatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar layanan dapat diakses secara adil dan merata oleh masyarakat. Seiring dengan tingginya kebutuhan pelayanan pencetakan KTP-el, serta adanya

kebijakan perluasan layanan cetak KTP-el di 40 kecamatan ketersediaan blangko menjadi faktor krusial dalam menjamin kelancaran layanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pemenuhan blangko KTP-el, antara lain melalui mekanisme hibah anggaran penyediaan blangko KTP-el yang dialokasikan melalui APBD kepada Pemerintah Pusat, sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan dan kecukupan pasokan blangko.

Berdasarkan kondisi tersebut, Optimalisasi Layanan Adminstrasi Kependudukan Berbasis Digital yang menjadi isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor menjadi sebuah tema penting yang mendasari pelaksanaan program - program strategis selama 5 tahun kedepan melalui inovasi pelayanan yang berjalan secara kontinyu dan berkesinambungan berbasis teknologi digital. Hal ini juga merupakan langkah kunci untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, jangkauan, dan kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029

Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 memiliki visi **"Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang"**, yang didalamnya memuat 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor mendukung misi pertama, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang Baik, selaras dengan misi ketujuh Nasional dan misi keempat Jawa Barat.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penetapan tujuan strategis, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang.

Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber

daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor adalah *"Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan".* Adapun alasan penggunaan indikator tujuan yang dipakai karena melihat dari sasaran daerah yang dimana terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Adapun Indikator dari tujuan menggunakan Cakupan Layanan Adminduk sebagai tolok ukur pencapaian.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka dalam rangka mewujudkan tujuan "*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan"*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor menetapkan sasaran :

1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminitsrasi Kependudukan

yang dimana berdasarkan dengan Permendagri 19 Tahun 2020. Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk;

Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 3.1 dibawah ini :

TABEL 3. 1

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, terintegrasi dan berbasis digital	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan				Cakupan Layanan Adminduk	%	78,50	80,75	81,74	84,17	85,70	87,63	
		1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	78,50	80,75	81,74	84,17	85,70	87,63	
		2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminitsrasi Kependudukan	2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk	Poin	88,24	89,36	90,21	91,09	91,98	92,55	

SUMBER : RPJMD Tahun 2025-2029

3.3 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang akan dilaksanakan oleh instansi dalam suatu lingkungan tertentu, untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, program, kegiatan atau sub kegiatan.

Strategi dan kebijakan tersebut dirumuskan dalam tiga tahun mendatang, untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD dapat dilihat pada tabel :

Sesuai dengan NSPK dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beberapa langkah konkrit dalam mencapai tujuan dan sasaran tergambar dalam beberapa arah kebijakan renstra yang ditetapkan yaitu :

1. Menerapkan Pelayanan langsung Perekaman KTP Elektronik dengan sistem jemput bola
2. Menerapkan Tanda Tangan Elektronik
3. Menerapkan Identitas Digital
4. Menyelenggarakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan Berbasis Aplikasi
5. Memanfaatan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri
6. Menerapkan Pelayanan langsung Akta Kelahiran dengan sistem jemput bola

7. Menerapan One Day Service (1 hari jadi) Penerbitan Akta Kelahiran
8. Menyelenggarakan Layanan Integrasi Paket Dokumen 2 in 1, 3 in 1, hingga 6 in 1
9. Menyelenggarakan Pelayanan Pencatatan Sipil Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan Berbasis Aplikasi
10. Melaksanakan validasi data ganda dan anomali berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
11. Melaksanakan penguatan fasilitasi dan pendampingan penanganan permasalahan dampak siak terpusat dalam pelayanan
12. Menyelenggarakan sosialisasi dan penjajakan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan Perangkat Daerah lain
13. Melaksanakan pengembangan inovasi pelayanan kependudukan berbasis SIAK dan KTP el
14. Melakukan pengembangan pola kerjasama pemanfaatan data dengan instansi lain

Arah kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil termuat dalam tabel 3.2 dibawah ini :

TABEL 3. 2
ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
1	Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk	Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN	Menerapkan Pelayanan langsung Perekaman KTP Elektronik dengan sistem jemput bola	
2	Meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil		Menerapkan Tanda Tangan Elektronik	
3	Meningkatkan pemanfaatan informasi kependudukan		Menerapkan Identitas Digital	
4	Meningkatkan kualitas profil kependudukan		Menyelenggarakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan Berbasis Aplikasi	
5			Memanfaatan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
6			Menerapkan Pelayanan langsung Akta Kelahiran dengan sistem jemput bola	
7			Menerapan One Day Service (1 hari jadi) Penerbitan Akta Kelahiran	
8			Menyelenggarakan Layanan Integrasi Paket Dokumen 2 in 1, 3 in 1, hingga 6 in 1	
9			Menyelenggarakan Pelayanan Pencatatan Sipil Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan Berbasis Aplikasi	
10			Melaksanakan validasi data ganda dan anomali berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
11			Melaksanakan penguatan fasilitasi dan pendampingan penanganan permasalahan dampak siak terpusat dalam pelayanan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
12			Menyelenggarakan sosialisasi dan penjajakan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan Perangkat Daerah lain	
13			Melaksanakan pengembangan inovasi pelayanan kependudukan berbasis SIAK dan KTP el	
14			Melakukan pengembangan pola kerjasama pemanfaatan data dengan instansi lain	

3.4 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan strategi tersebut, selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan program. Strategi diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hal ini, strategi akan melahirkan program-program. Terdapat empat strategi yang menjadi prioritas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran, yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Pengumpulan dan Penyajian data Kependudukan
4. Pemanfaatan Database Kependudukan

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 3.3 dibawah ini :

TABEL 3. 3
STRATEGI DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Strategi I	Strategi I	Strategi I	Strategi I	Strategi I	Strategi I
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
Menerapkan Pelayanan langsung Perekaman KTP Elektronik dengan sistem jemput bola tingkat kecamatan	Menerapkan Pelayanan langsung Perekaman KTP Elektronik dengan sistem jemput bola tingkat desa dan kelurahan	Menerapkan Pelayanan langsung Perekaman KTP Elektronik dengan sistem jemput bola door to door	Menerapkan Pelayanan langsung Perekaman KTP Elektronik dengan sistem jemput bola door to door	Menerapkan Pelayanan langsung Perekaman KTP Elektronik dengan sistem jemput bola door to door	Menerapkan Pelayanan langsung Perekaman KTP Elektronik dengan sistem jemput bola door to door

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Menerapkan Tanda Tangan Elektronik	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik
Menerapkan Identitas Digital	Menerapkan peningkatan layanan keliling Identitas Digital	Menerapkan peningkatan layanan keliling Identitas Digital	Menerapkan peningkatan layanan keliling Identitas Digital	Menerapkan peningkatan layanan keliling Identitas Digital	Menerapkan peningkatan layanan keliling Identitas Digital
Menyelenggarakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan	Menyelenggarakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan Berbasis Aplikasi	Menyelenggarakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan Berbasis Aplikasi	Menyelenggarakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan Berbasis Aplikasi	Menyelenggarakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan Berbasis Aplikasi	Menyelenggarakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan Berbasis Aplikasi

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Memanfaatan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri	Memanfaatan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri	Memanfaatan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri	Memanfaatan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri	Memanfaatan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri	Memanfaatan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri
Strategi II	Strategi II	Strategi II	Strategi II	Strategi II	Strategi II
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
Menerapkan Pelayanan langsung Akta Kelahiran dengan sistem jemput bola	Menerapkan Pelayanan langsung Akta Kelahiran dengan sistem jemput bola	Menerapkan Pelayanan langsung Akta Kelahiran dengan sistem jemput bola	Menerapkan Pelayanan langsung Akta Kelahiran dengan sistem jemput bola	Menerapkan Pelayanan langsung Akta Kelahiran dengan sistem jemput bola	Menerapkan Pelayanan langsung Akta Kelahiran dengan sistem jemput bola
Menerapan One Day Service (1 hari jadi) Penerbitan Akta Kelahiran	Menerapan One Day Service (1 hari jadi) Penerbitan Akta Kelahiran	Menerapan One Day Service (1 hari jadi) Penerbitan Akta	Menerapan One Day Service (1 hari jadi) Penerbitan Akta	Menerapan One Day Service (1 hari jadi) Penerbitan Akta Kelahiran serta	Menerapan One Day Service (1 hari jadi) Penerbitan Akta

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	serta layanan berbasis online aplikasi	Kelahiran serta layanan berbasis online aplikasi	Kelahiran serta layanan berbasis online aplikasi	layanan berbasis online aplikasi	Kelahiran serta layanan berbasis online aplikasi
Menyelenggarakan Layanan Integrasi Paket Dokumen 2 in 1, 3 in 1	Menyelenggarakan Layanan Integrasi Paket Dokumen 2 in 1, 3 in 1, hingga 4 in 1	Menyelenggarakan Layanan Integrasi Paket Dokumen 2 in 1, 3 in 1, hingga 5 in 1	Menyelenggarakan Layanan Integrasi Paket Dokumen 2 in 1, 3 in 1, hingga 6 in 1	Menyelenggarakan Layanan Integrasi Paket Dokumen 2 in 1, 3 in 1, hingga 6 in 1	Menyelenggarakan Layanan Integrasi Paket Dokumen 2 in 1, 3 in 1, hingga 6 in 1
Menyelenggarakan Pelayanan Pencatatan Sipil Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan	Menyelenggarakan Pelayanan Pencatatan Sipil Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan Berbasis Aplikasi	Melakukan pengembangan inovasi Pelayanan Pencatatan Sipil Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan Berbasis Aplikasi	Melakukan pengembangan inovasi Pelayanan Pencatatan Sipil Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan Berbasis Aplikasi	Melakukan pengembangan inovasi Pelayanan Pencatatan Sipil Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan Berbasis Aplikasi	Melakukan pengembangan inovasi Pelayanan Pencatatan Sipil Dokumen Kependudukan di Tingkat Desa Kelurahan Berbasis Aplikasi
Strategi III	Strategi III	Strategi III	Strategi III	Strategi III	Strategi III

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pengumpulan dan Penyajian data kependudukan	Pengumpulan dan Penyajian data kependudukan	Pengumpulan dan Penyajian data kependudukan	Pengumpulan dan Penyajian data kependudukan	Pengumpulan dan Penyajian data kependudukan	Pengumpulan dan Penyajian data kependudukan
Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
Melaksanakan validasi data ganda dan anomali berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Melaksanakan validasi data ganda dan anomali berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Melaksanakan validasi data ganda dan anomali berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Melaksanakan validasi data ganda dan anomali berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Melaksanakan validasi data ganda dan anomali berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Melaksanakan validasi data ganda dan anomali berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Melaksanakan penguatan fasilitasi dan pendampingan penanganan permasalahan dampak siak terpusat dalam pelayanan	Melaksanakan penguatan fasilitasi dan pendampingan penanganan permasalahan dampak siak terpusat dalam pelayanan	Melaksanakan penguatan fasilitasi dan pendampingan penanganan permasalahan dampak siak terpusat dalam pelayanan	Melaksanakan penguatan fasilitasi dan pendampingan penanganan permasalahan dampak siak	Melaksanakan penguatan fasilitasi dan pendampingan penanganan permasalahan dampak siak terpusat dalam pelayanan	Melaksanakan penguatan fasilitasi dan pendampingan penanganan permasalahan dampak siak terpusat dalam pelayanan

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			terpusat dalam pelayanan		
Strategi IV	Strategi IV	Strategi IV	Strategi IV	Strategi IV	Strategi IV
Pemanfaatan database kependudukan	Pemanfaatan database kependudukan	Pemanfaatan database kependudukan	Pemanfaatan database kependudukan	Pemanfaatan database kependudukan	Pemanfaatan database kependudukan
Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
Menyelenggarakan sosialisasi dan penjajakan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan Perangkat Daerah lain	Menyelenggarakan sosialisasi dan penjajakan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan Perangkat Daerah lain	Menyelenggarakan sosialisasi dan penjajakan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan Perangkat Daerah lain	Menyelenggarakan sosialisasi dan penjajakan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan Perangkat Daerah lain	Menyelenggarakan sosialisasi dan penjajakan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan Perangkat Daerah lain	Menyelenggarakan sosialisasi dan penjajakan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan Perangkat Daerah lain

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Melaksanakan penyediaan inovasi pelayanan kependudukan	Melaksanakan pengembangan inovasi pelayanan kependudukan berbasis aplikasi digital	Melaksanakan pengembangan inovasi pelayanan kependudukan berbasis aplikasi digital	Melaksanakan pengembangan inovasi pelayanan kependudukan berbasis aplikasi digital	Melaksanakan pengembangan inovasi pelayanan kependudukan berbasis aplikasi digital terintegrasi	Melaksanakan pengembangan inovasi pelayanan kependudukan berbasis aplikasi digital terintegrasi
Melakukan pengembangan pola kerjasama pemanfaatan data dengan beberapa instansi lain	Melakukan pengembangan pola kerjasama pemanfaatan data dengan perluasan jumlah instansi lain	Melakukan pengembangan pola kerjasama pemanfaatan data dengan perluasan jumlah instansi lain	Melakukan pengembangan pola kerjasama pemanfaatan data dengan perluasan jumlah instansi lain	Melakukan pengembangan pola kerjasama pemanfaatan data dengan perluasan jumlah instansi lain	Melakukan pengembangan pola kerjasama pemanfaatan data dengan seluruh instansi lain

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor mempunyai program, kegiatan, sub kegiatan hingga tahun 2029 yang terdiri dari 4 program prioritas dan 1 program penunjang yang mendukung langsung tujuan dan sasaran perangkat daerah, dengan 19 kegiatan, 116 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk
    a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
        1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
        2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
        3) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
        4) Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
        5) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
        6) Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

7) Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
8) Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk

b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
   1) Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   2) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk
   3) Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
c. Penataan Pendaftaran Penduduk
   1) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
   2) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
d. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
   1) Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT I
   2) Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT II
   3) Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT III
   4) Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT IV

5) Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT V
6) Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT VI
7) Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT VII
8) Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
9) Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
10) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk
11) Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
12) Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk
13) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
14) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk

2. Program Pencatatan Sipil
   a. Pelayanan Pencatatan Sipil
      1) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
      2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
      3) Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
      4) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil

5) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan

b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

1) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT I
2) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT II
3) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT III
4) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT IV
5) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT V
6) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT VI
7) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT VII
8) Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
9) Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan

Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

10) Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
11) Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil
12) Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
13) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
14) Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
15) Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil
16) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil
17) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil

c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
    1) Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
    2) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
    3) Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
    4) Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan

a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
   1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
   2) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
   3) Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   1) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   2) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
   3) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   4) Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   5) Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri
   6) Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
   7) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
   8) Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   1) Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   2) Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam

3) Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

a. Penyusunan Profil Kependudukan

1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain
2) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Adapun program lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8) Penyelenggaraan walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
7) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Selanjutnya perencanaan mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor termuat dalam tabel 4.1 dibawah ini :

TABEL 4. 1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2025-2029

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, terintegrasi dan berbasis digital	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan**				**Cakupan Layanan Adminduk**		
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			**Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**		
			Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		**Cakupan penerbitan KTP**	**Program Pendaftaran Penduduk**	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk Yang Memenuhi Standar Pelayanan	Persentase Penyelesaian Pelayanan Pendaftaran Penduduk Yang Memenuhi Standar Pelayanan	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)		
				Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah orang hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	
				Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
					Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan		
					Jumlah KIA		
					Jumlah KK		
					Jumlah Perekaman KTP elektronik		
					Jumlah SKTT		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah laporan Pencatatan atas Peristiwa Kependudukan	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah laporan Penerbitan dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Dukungan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyediaan Dukungan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan yang disusun	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk Yang Memenuhi Standar Pelayanan pada 7 UPT	Presentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk pada 7 UPT	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Koordinasi antarLembaga Pemerintah dan LembagaNon-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada UPT Wilayah I	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah I	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada UPT Wilayah II	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah II	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pelayanan Secara AktifPendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada UPT Wilayah III	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah III	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada UPT Wilayah IV	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah IV	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada UPT Wilayah V	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah V	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pelayanan Secara AktifPendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada UPT Wilayah VI	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah VI	
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada UPT Wilayah VII	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah VII	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pengelolaan danPelaporan Penggunaan BlangkoDokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendataran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Anak**	**Program Pencatatan Sipil**	
				Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Memenuhi Standar Pelayanan	Persentase Penyelesaian Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Memenuhi Standar Pelayanan	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	
					Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah akta perceraian yang diterbitkan		
					Jumlah akta Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan anak yang diterbitkan		
				Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan		
					Jumlah akta kematian yang diterbitkan		
					Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Kependudukan Yang Tersusun		
				Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	
				Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Memenuhi Standar Pelayanan pada 7 UPT	Persentase Penyelesaian Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Memenuhi Standar Pelayanan pada 7 UPT	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
					Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		

				Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	

				Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada UPT Wilayah I	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 1	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada UPT Wilayah II	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 2	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada UPT Wilayah III	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 3	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada UPT Wilayah IV	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 4	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada UPT Wilayah V	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 5	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada UPT Wilayah VI	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 6	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada UPT Wilayah VII	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 7	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri terkait Pencatatan Sipil	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	
				Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	
				Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	

				Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait PencatatanSipil	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminitsrasi Kependudukan			**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk**		
			Meningkatnya Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan		**Persentase Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Kependudukan**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama		
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
					Jumlah Pengolahan dan Penyajian NIK/Data yang tertangani		
				Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
					Jumlah Instansi Pengguna Pemanfaatan Data Kependudukan yang terlayani		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	
				Meningkatnya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	
				Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
				Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil		
					Jumlah Sosialisasi Radio / TV		
					Jumlah Poster		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Standing Banner		
				Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	
				Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

				Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah dokumen Supervisi bersama dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
			Penyajian Profil Kependudukan sesuai ketentuan		**Persentase data profil kependudukan yang tersaji**	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	
				Meningkatnya Kualitas Buku Profil Kependudukan	Persentase Buku Profil Kependudukan yang Akurat dan Mutakhir	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah publikasi kinerja skpd pada media massa		
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Pengelolaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya Layanan Kepegawaian	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah BBM yang tersedia		
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu dalam satu tahun		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
					Jumlah jasa komunikasi , air dan listrik yang dibayarkan		
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Alat Kebersihan		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibiayai		
					Jumlah Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengamanan, Gedung Dinas		
					Jumlah Jasa Keamanan Yang Tersedia		
					Jumlah jamuan makanan dan minuman rapat		
					Jumlah peserta olahraga		
					Jumlah peserta pengajian		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Terlaksananya pembinaan mental dan rohani bagi aparatur Disdukcapil		
				Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Rencana program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor disusun guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah serta memenuhi pelayanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Program yang dirancang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan strategi serta kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan. Rencana program kegiatan ini mencakup target capaian serta pagu indikatif yang menggambarkan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaannya. Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2030 tersaji secara rinci pada tabel 4.2 berikut ini :

TABEL 4. 2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2030

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan KTP	%	98,43	11.092.577.751,00	98,72	12.981.507.078,00	98,92	17.970.907.751,00	99,09	17.981.119.635,29	99,12	18.942.517.130,65	99,22	19.825.403.581,01	99,66	21.144.695.269,33	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	37,52	2.426.220.937,00	42,68	3.686.688.096,00	48,78	5.826.455.401,00	50,74	4.827.652.451,71	56,68	5.085.772.804,35	60,79	5.322.814.158,99	65,28	5.677.023.567,67	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase penyelesaian penerbitan pendaftaran penduduk yang memenuhi standar pelayanan	%	100,00	1.451.421.286,00	100,00	1.741.017.628,00	100,00	3.419.161.077,00	100,00	2.695.397.167,42	100,00	2.830.167.025,81	100,00	2.971.675.377,09	100,00	3.120.259.145,94	
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	7,42	1.286.153.965,00	9,00	2.650.755.950,00	11,20	2.898.486.725,00	13,40	2.967.204.553,29	15,60	3.115.564.783,40	17,80	3.271.343.021,90	20,00	3.434.910.172,31	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2,00	1.286.153.965,00	2,00	2.650.755.950,00	2,00	2.898.486.725,00	2,00	2.967.204.553,29	2,00	3.115.564.783,40	2,00	3.271.343.021,90	2,00	3.434.910.172,31	
	Jumlah orang hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Orang	600,00		630,00		660,00		660,00		660,00		660,00		660,00		
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	69.655,00	246.538.864,00	73.130,00	213.388.979,00	76.795,00	705.484.083,00	76.795,00	264.271.817,72	76.795,00	277.485.408,61	76.795,00	291.359.679,04	76.795,00	305.927.662,99	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	275,00	-	275,00	-	275,00	224.999.825,00	275,00	12.155.062,50	275,00	12.762.815,63	275,00	13.400.956,41	275,00	14.071.004,23	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	12,00	-	12,00	249.025.000,00	12,00	708.451.425,00	12,00	555.345.787,50	12,00	583.113.076,88	12,00	612.268.730,72	12,00	642.882.167,25	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	371.020,00	1.204.882.422,00	389.560,00	1.278.603.649,00	626.675,00	1.633.707.744,00	626.675,00	1.717.763.749,70	626.675,00	1.803.651.937,18	626.675,00	1.893.834.534,04	626.675,00	1.988.526.260,74	
	Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan	Keping	110.750,00		116.285,00		357.000,00		357.000,00		357.000,00		357.000,00		357.000,00		

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah KIA	Keping	110.750,00		116.285,00		118.000,00		118.000,00		118.000,00		118.000,00		118.000,00		
	Jumlah KK	Lembar	29.500,00		30.975,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		
	Jumlah Perekaman KTP elektronik	Jiwa	118.500,00		124.425,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00		
	Jumlah SKTT	Lembar	1.520,00		1.590,00		1.675,00		1.675,00		1.675,00		1.675,00		1.675,00		
Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	12,00	-	12,00	-	12,00	12.971.000,00	12,00	12.155.062,50	12,00	12.762.815,63	12,00	13.400.956,41	12,00	14.071.004,23	
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	12,00	-	12,00	-	12,00	12.147.000,00	12,00	12.155.062,50	12,00	12.762.815,63	12,00	13.400.956,41	12,00	14.071.004,23	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Dokumen	2,00	-	2,00	-	2,00	121.400.000,00	2,00	121.550.625,00	2,00	127.628.156,25	2,00	134.009.564,06	2,00	140.710.042,27	
Penataan Pendaftaran Penduduk	**Persentase penyediaan dukungan pelayanan Pendaftaran Penduduk**	%	**100,00**	-	**100,00**	**1.498.399.650,00**	**100,00**	**2.179.372.640,00**	**100,00**	**2.045.485.243,71**	**100,00**	**2.164.497.238,35**	**100,00**	**2.255.474.812,99**	**100,00**	**2.456.317.254,67**	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen	1,00	-	1,00	-	1,00	79.955.599,00	1,00	71.107.115,63	1,00	74.662.471,41	1,00	78.395.594,98	1,00	82.315.374,73	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	1,00	-	1,00	1.498.399.650,00	1,00	2.099.417.041,00	1,00	1.974.378.128,08	1,00	2.089.834.766,94	1,00	2.177.079.218,01	1,00	2.374.001.879,94	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Presentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk pada 7 UPT**	%	**100,00**	**10.781.223.437,00**	**100,00**	**10.778.021.946,00**	**100,00**	**14.430.569.735,00**	**100,00**	**14.237.675.685,08**	**100,00**	**15.011.900.978,06**	**100,00**	**15.698.256.623,17**	**100,00**	**16.811.190.963,99**	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	4,00	-	4,00	-	4,00	12.079.000,00	4,00	12.155.062,50	4,00	12.762.815,63	4,00	13.400.956,41	4,00	14.071.004,23	
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT I	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	28.150,00	281.959.788,00	28.400,00	229.165.213,00	52.000,00	414.651.025,00	52.000,00	272.539.751,00	52.000,00	286.166.738,00	52.000,00	300.475.075,00	52.000,00	315.498.829,00	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT II	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	28.150,00	265.269.068,00	28.400,00	232.008.938,00	60.000,00	392.358.376,00	60.000,00	310.060.913,00	60.000,00	325.563.958,00	60.000,00	341.842.156,00	60.000,00	358.934.264,00	
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT III	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	28.150,00	389.839.448,00	28.400,00	369.840.658,00	55.500,00	460.929.930,00	55.500,00	440.650.985,00	55.500,00	462.683.534,00	55.500,00	485.817.711,00	55.500,00	510.108.596,00	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT IV	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	28.150,00	407.908.808,00	28.400,00	365.778.658,00	53.000,00	578.801.844,00	53.000,00	472.056.883,00	53.000,00	495.659.727,00	53.000,00	520.442.713,00	53.000,00	546.464.849,00	
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT V	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	28.150,00	285.197.433,00	28.400,00	247.100.322,00	41.800,00	613.941.319,00	41.800,00	323.331.522,00	41.800,00	339.498.098,00	41.800,00	356.473.003,00	41.800,00	374.296.653,00	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT VI	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	28.150,00	330.147.636,00	28.400,00	309.006.156,00	53.900,00	609.148.776,00	53.900,00	446.996.063,00	53.900,00	469.345.866,00	53.900,00	492.813.160,00	53.900,00	517.453.818,00	
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT VII	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	28.150,00	465.898.756,00	28.400,00	435.388.501,00	60.000,00	577.251.491,00	60.000,00	516.531.091,00	60.000,00	542.357.645,00	60.000,00	569.475.528,00	60.000,00	597.949.304,00	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	2,00	8.355.002.500,00	2,00	8.589.733.500,00	2,00	10.701.963.974,00	2,00	10.912.552.227,21	2,00	11.520.521.349,73	2,00	12.032.308.011,67	2,00	12.961.944.922,22	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Dokumen	12,00	-	12,00	-	12,00	1.200.000,00	12,00	12.155.062,50	12,00	12.762.815,63	12,00	13.400.956,41	12,00	14.071.004,23	
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	6,00	-	6,00	-	2,00	64.594.000,00	2,00	271.125.901,90	2,00	284.682.196,94	2,00	298.916.306,85	2,00	313.862.122,19	
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	12,00	-	12,00	-	12,00	1.200.000,00	12,00	12.155.062,50	12,00	12.762.815,63	12,00	13.400.956,41	12,00	14.071.004,23	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	2,00	-	2,00	-	2,00	1.250.000,00	2,00	223.210.097,97	2,00	234.370.602,87	2,00	246.089.133,01	2,00	258.393.589,66	
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Dokumen	1,00	-	1,00	-	1,00	1.200.000,00	1,00	12.155.062,50	1,00	12.762.815,63	1,00	13.400.956,41	1,00	14.071.004,23	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	%	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	**869.772.975,00**	**100,00**	**863.009.437,50**	**100,00**	**906.159.909,38**	**100,00**	**951.467.904,85**	**100,00**	**999.041.300,09**	
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	3,00	-	3,00	-	3,00	120.780.000,00	3,00	121.550.625,00	3,00	127.628.156,25	3,00	134.009.564,06	3,00	140.710.042,27	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Laporan	4,00	-	4,00	-	4,00	30.874.000,00	4,00	12.155.062,50	4,00	12.762.815,63	4,00	13.400.956,41	4,00	14.071.004,23	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1,00	-	1,00	-	1,00	718.118.975,00	1,00	729.303.750,00	1,00	765.768.937,50	1,00	804.057.384,38	1,00	844.260.253,59	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Cakupan penerbitan akte kelahiran anak**	**%**	**92,11**	**2.191.762.859,00**	**94,09**	**3.815.717.183,00**	**94,54**	**6.002.218.336,00**	**95,40**	**6.247.918.149,00**	**96,73**	**6.581.975.926,00**	**97,08**	**6.888.753.390,00**	**97,94**	**7.347.169.031,00**	
Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentase Penyelesaian Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Memenuhi Standar Pelayanan**	**%**	**100,00**	**430.736.131,00**	**100,00**	**748.583.905,00**	**100,00**	**983.402.510,00**	**100,00**	**1.155.561.731,89**	**100,00**	**1.043.066.175,48**	**100,00**	**1.274.006.809,40**	**100,00**	**1.337.707.149,88**	
	Persentase akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	**%**	**100,00**	**69.940.258,00**	**100,00**	**85.627.543,00**	**100,00**	**331.933.961,00**	**100,00**	**117.850.103,42**	**100,00**	**123.742.608,63**	**100,00**	**129.929.739,22**	**100,00**	**136.426.226,87**	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	**%**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**1.200.000,00**	**100,00**	**134.255.704,08**	**100,00**	**140.968.489,28**	**100,00**	**148.016.913,75**	**100,00**	**155.417.759,43**	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	943,00	69.940.258,00	995,00	85.627.543,00	1.335,00	331.933.961,00	1.335,00	117.850.103,42	1.335,00	123.742.608,63	1.335,00	129.929.739,22	1.335,00	136.426.226,87	
	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	Akta	772,00		810,00		960,00		960,00	-	960,00	-	960,00	-	960,00	-	
	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	Akta	61,00		65,00		105,00		105,00	-	105,00	-	105,00	-	105,00	-	
	Jumlah akta Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan anak yang diterbitkan	Akta	110,00		120,00		270,00		270,00	-	270,00	-	270,00	-	270,00	-	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	55.674,00	430.736.131,00	58.422,00	748.583.905,00	67.852,00	980.902.510,00	67.852,00	1.015.778.513,14	67.852,00	896.293.795,79	67.852,00	1.119.895.810,73	67.852,00	1.175.890.601,27	
	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	Akta	55.125,00		57.850,00		57.850,00		57.850,00	-	57.850,00	-	57.850,00	-	57.850,00	-	
	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	Akta	547,00		570,00		10.000,00		10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	
	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Kependudukan Yang Tersusun	Laporan	2,00		2,00		2,00		2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen	1,00	-	1,00	-	1,00	1.250.000,00	1,00	121.550.625,00	1,00	127.628.156,25	1,00	134.009.564,06	1,00	140.710.042,27	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	1,00	-	1,00	-	1,00	1.250.000,00	1,00	18.232.593,75	1,00	19.144.223,44	1,00	20.101.434,61	1,00	21.106.506,34	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	1,00	-	1,00	-	1,00	1.200.000,00	1,00	134.255.704,08	1,00	140.968.489,28	1,00	148.016.913,75	1,00	155.417.759,43	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelesaian Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Memenuhi Standar Pelayanan pada 7 UPT	%	100,00	1.486.740.346,00	100,00	2.299.275.235,00	100,00	3.724.060.945,00	100,00	3.015.662.703,50	100,00	3.166.445.838,63	100,00	3.324.768.130,41	100,00	3.491.006.536,23	
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,00	204.346.124,00	100,00	682.230.500,00	100,00	704.952.345,00	100,00	664.536.003,75	100,00	828.055.529,45	100,00	644.925.711,92	100,00	699.794.515,22	
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,00	-	100,00	-	100,00	5.600.000,00	100,00	395.039.531,25	100,00	414.791.507,83	100,00	435.531.083,21	100,00	457.307.637,38	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	2,00	-	2,00	-	2,00	1.200.000,00	2,00	12.155.062,50	2,00	12.762.815,63	2,00	13.400.956,41	2,00	14.071.004,23	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	2,00	-	2,00	-	2,00	1.100.000,00	2,00	12.155.062,50	2,00	12.762.815,63	2,00	13.400.956,41	2,00	14.071.004,23	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	2,00	-	2,00	-	2,00	1.150.000,00	2,00	12.155.062,50	2,00	12.762.815,63	2,00	13.400.956,41	2,00	14.071.004,23	
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT I	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	22.150,00	212.507.231,00	12.717,00	291.874.781,00	13.000,00	427.453.109,00	13.000,00	374.915.964,00	13.000,00	393.661.762,00	13.000,00	413.344.850,00	13.000,00	434.012.092,00	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	12,00	-	12,00		12,00		12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT II	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	22.150,00	266.653.876,00	14.669,00	286.803.631,00	15.000,00	583.287.587,00	15.000,00	349.919.009,00	15.000,00	367.414.959,00	15.000,00	385.785.707,00	15.000,00	405.074.992,00	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	12,00		12,00		12,00		12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT III	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	22.150,00	187.136.140,00	20.151,00	365.045.915,00	20.500,00	553.904.337,00	20.500,00	478.941.727,00	20.500,00	502.888.814,00	20.500,00	528.033.254,00	20.500,00	554.434.917,00	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	12,00		12,00		12,00		12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT IV	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	22.150,00	174.031.676,00	15.925,00	312.743.540,00	16.000,00	506.238.844,00	16.000,00	416.337.670,00	16.000,00	437.154.554,00	16.000,00	459.012.282,00	16.000,00	481.962.896,00	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	12,00		12,00		12,00		12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT V	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	22.150,00	241.631.047,00	15.399,00	399.577.472,00	15.500,00	547.680.594,00	15.500,00	515.867.198,00	15.500,00	541.660.558,00	15.500,00	568.743.586,00	15.500,00	597.180.766,00	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	12,00		12,00		12,00		12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT VI	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	22.150,00	208.893.780,00	14.937,00	329.513.265,00	15.000,00	455.210.105,00	15.000,00	456.047.185,00	15.000,00	478.849.544,00	15.000,00	502.792.021,00	15.000,00	527.931.622,00	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	12,00		12,00		12,00		12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT VII	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	22.150,00	195.886.596,00	19.520,00	313.716.631,00	20.000,00	649.186.369,00	20.000,00	411.478.888,00	20.000,00	432.052.832,00	20.000,00	453.655.474,00	20.000,00	476.338.247,00	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	12,00		12,00		12,00		12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	
Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	2,00	-	2,00	-	2,00	1.150.000,00	2,00	12.155.062,50	2,00	12.762.815,63	2,00	13.400.956,41	2,00	14.071.004,23	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	12,00	204.346.124,00	12,00	682.230.500,00	12,00	701.602.345,00	12,00	628.070.816,25	12,00	789.767.082,56	12,00	604.722.842,69	12,00	657.581.502,53	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	12,00	-	12,00	-	12,00	1.000.000,00	12,00	12.155.062,50	12,00	12.762.815,63	12,00	13.400.956,41	12,00	14.071.004,23	
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	6,00	-	6,00	-	6,00	1.100.000,00	6,00	176.248.406,25	6,00	185.060.826,56	6,00	194.313.867,89	6,00	204.029.561,29	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	12,00	-	12,00	-	12,00	1.100.000,00	12,00	12.155.062,50	12,00	12.762.815,63	12,00	13.400.956,41	12,00	14.071.004,23	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Orang	2,00	-	2,00	-	2,00	1.150.000,00	2,00	182.325.937,50	2,00	191.442.234,38	2,00	201.014.346,09	2,00	211.065.063,40	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	-	1,00	-	1,00	1.100.000,00	1,00	12.155.062,50	1,00	12.762.815,63	1,00	13.400.956,41	1,00	14.071.004,23	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**%**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**251.068.575,00**	**100,00**	**765.012.371,11**	**100,00**	**864.905.776,70**	**100,00**	**931.575.002,09**	**100,00**	**1.069.509.205,99**	
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	2,00	-	2,00	-	2,00	1.000.000,00	2,00	145.860.750,00	2,00	153.153.787,50	2,00	160.811.476,88	2,00	168.852.050,72	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Laporan	4,00	-	4,00	-	4,00	1.150.000,00	4,00	36.465.187,50	4,00	38.288.446,88	4,00	40.202.869,22	4,00	42.213.012,68	

Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan	2,00	-	2,00	-	2,00	1.500.000,00	2,00	86.159.062,91	2,00	90.467.016,06	2,00	94.990.366,86	2,00	99.739.885,21	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00		1,00	-	1,00	247.418.575,00	1,00	496.527.370,70	1,00	582.996.526,26	1,00	635.570.289,13	1,00	758.704.257,38	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Kependudukan**	**%**	**100,00**	**2.471.148.246,00**	**100,00**	**1.943.069.955,00**	**100,00**	**1.865.685.340,00**	**100,00**	**3.328.362.810,00**	**100,00**	**3.506.320.564,00**	**100,00**	**3.669.745.672,00**	**100,00**	**3.913.950.787,00**	
	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	**%**	**65,71**	**701.686.115,00**	**83,33**	**925.923.697,00**	**85,71**	**1.521.620.542,00**	**90,48**	**1.178.998.087,00**	**91,67**	**1.242.035.641,00**	**96,00**	**1.299.925.331,00**	**96,67**	**1.386.429.531,00**	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan**	**%**	**100,00**	**78.755.451,00**	**100,00**	**75.530.143,00**	**100,00**	**122.105.836,00**	**100,00**	**164.189.418,91**	**100,00**	**172.398.889,86**	**100,00**	**181.018.834,34**	**100,00**	**190.069.775,06**	
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	12,00	78.755.451,00	12,00	75.530.143,00	12,00	120.605.836,00	12,00	103.414.106,41	12,00	108.584.811,73	12,00	114.014.052,31	12,00	119.714.753,93	
	Jumlah Pengolahan dan Penyajian NIK/Data yang tertangani	Data	340.000,00		350.000,00		300.000,00		300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	-	
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	10,00	99.411.818,00	10,00	89.988.593,00	10,00	214.936.643,00	10,00	132.189.494,22	10,00	138.798.968,93	10,00	145.738.917,38	10,00	153.025.863,25	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Instansi Pengguna Pemanfaatan Data Kependudukan yang terlayani	Instansi	13,00		17,00		20,00		20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	1,00	-	1,00	-	1,00	1.500.000,00	1,00	60.775.312,50	1,00	63.814.078,13	1,00	67.004.782,03	1,00	70.355.021,13	
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	%	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**24.310.125,00**	**100,00**	**25.525.631,25**	**100,00**	**26.801.912,81**	**100,00**	**28.142.008,45**	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	1,00	-	1,00	-	1,00	1.000.000,00	1,00	24.310.125,00	1,00	25.525.631,25	1,00	26.801.912,81	1,00	28.142.008,45	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Presentase Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan**	%	**100,00**	**2.392.392.795,00**	**100,00**	**1.799.170.212,00**	**100,00**	**1.263.011.529,00**	**100,00**	**2.598.147.707,09**	**100,00**	**2.739.594.705,93**	**100,00**	**2.864.683.521,05**	**100,00**	**3.068.635.529,51**	
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	2,00	-	2,00	-	2,00	1.200.000,00	2,00	12.155.062,50	2,00	12.762.815,63	2,00	13.400.956,41	2,00	14.071.004,23	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Dokumen	2,00	-	2,00	-	2,00	1.200.000,00	2,00	12.155.062,50	2,00	12.762.815,63	2,00	13.400.956,41	2,00	14.071.004,23	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	12,00	2.392.392.795,00	12,00	1.799.170.212,00	12,00	1.257.011.529,00	12,00	2.239.964.244,68	12,00	2.363.502.070,39	12,00	2.469.786.253,73	12,00	2.653.993.398,83	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	8,00	290.919.829,00	17,00	200.123.195,00	20,00	499.065.322,00	20,00	302.532.581,93	20,00	317.659.211,02	20,00	333.542.171,57	20,00	350.219.280,15	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	427,00	311.354.468,00	448,00	635.811.909,00	467,00	807.618.577,00	467,00	744.276.010,85	467,00	785.577.461,05	467,00	820.644.242,05	467,00	883.184.387,60	
	Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil	Kali	41,00		45,00		47,00		47,00	-	47,00	-	47,00	-	47,00	-	
	Jumlah Sosialisasi Radio / TV	Kali	11,00		13,00		15,00		15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	
	Jumlah Poster	Buah	265,00		270,00		280,00		280,00	-	280,00	-	280,00	-	280,00	-	
	Jumlah Standing Banner	Buah	110,00		120,00		125,00		125,00	-	125,00	-	125,00	-	125,00	-	
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen	12,00	-	12,00	-	12,00	1.200.000,00	12,00	12.155.062,50	12,00	12.762.815,63	12,00	13.400.956,41	12,00	14.071.004,23	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Paket	2,00	-	2,00	-	2,00	1.200.000,00	2,00	238.017.030,46	2,00	249.917.881,98	2,00	262.413.776,08	2,00	275.534.464,88	
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	Dokumen	110.000	-	115.000	-	120,00	1.200.000,00	120,00	83.701.244,45	120,00	87.886.306,67	120,00	92.280.622,01	120,00	96.894.653,11	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	%	**100,00**	-	**100,00**	**68.369.600,00**	**100,00**	**479.567.975,00**	**100,00**	**541.715.559,00**	**100,00**	**568.801.336,96**	**100,00**	**597.241.403,80**	**100,00**	**627.103.473,98**	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4,00	-	4,00	-	4,00	120.897.375,00	4,00	89.250.000,00	4,00	93.712.500,00	4,00	98.398.125,00	4,00	103.318.031,25	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dokumen	2,00	-	2,00	-	2,00	1.250.000,00	2,00	60.775.312,50	2,00	63.814.078,13	2,00	67.004.782,03	2,00	70.355.021,13	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	1,00	-	1,00	68.369.600,00	1,00	357.420.600,00	1,00	391.690.246,50	1,00	411.274.758,83	1,00	431.838.496,77	1,00	453.430.421,60	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Persentase data profil kependudukan yang tersaji**	**%**	**100,00**	**57.502.000,00**	**100,00**	**51.984.750,00**	**100,00**	**87.233.082,00**	**100,00**	**102.156.634,00**	**100,00**	**107.618.648,00**	**100,00**	**112.634.615,00**	**100,00**	**120.129.944,00**	
Penyusunan Profil Kependudukan	**Persentase Buku Profil Kependudukan yang Akurat dan Mutakhir**	**%**	**100,00**	**57.502.000,00**	**100,00**	**51.984.750,00**	**100,00**	**87.233.082,00**	**100,00**	**102.156.634,00**	**100,00**	**107.618.648,00**	**100,00**	**112.634.615,00**	**100,00**	**120.129.944,00**	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	-	1,00	-	1,00	3.595.851,00	1,00	40.972.325,37	1,00	44.028.832,59	1,00	46.613.266,77	1,00	50.437.638,26	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	1,00	57.502.000,00	1,00	51.984.750,00	1,00	83.637.231,00	1,00	61.184.308,63	1,00	63.589.815,41	1,00	66.021.348,23	1,00	69.692.305,74	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**38.231.534.556,00**	**BB**	**39.555.618.052,00**	**BB**	**45.819.262.338,00**	**BB**	**60.082.801.814,00**	**BB**	**63.295.252.221,00**	**BB**	**66.245.362.821,00**	**BB**	**70.653.694.598,00**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas**	**%**	**100,00**	**297.741.574,00**	**100,00**	**493.118.193,00**	**100,00**	**847.028.804,00**	**100,00**	**688.908.124,66**	**100,00**	**723.353.530,87**	**100,00**	**759.521.207,42**	**100,00**	**797.497.267,79**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	37.024.450,00	3,00	79.052.475,00	3,00	203.237.000,00	3,00	138.002.653,69	3,00	144.902.786,37	3,00	152.147.925,69	3,00	159.755.321,98	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	18.542.120,00	1,00	24.047.150,00	1,00	31.655.050,00	1,00	27.603.457,88	1,00	28.983.630,77	1,00	30.432.812,31	1,00	31.954.452,92	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	24.633.280,00	1,00	16.293.650,00	1,00	23.947.725,00	1,00	18.509.486,63	1,00	19.434.960,96	1,00	20.406.709,00	1,00	21.427.044,45	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	21.443.560,00	1,00	18.244.725,00	1,00	20.638.250,00	1,00	20.660.546,81	1,00	21.693.574,15	1,00	22.778.252,86	1,00	23.917.165,50	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	13.172.020,00	1,00	15.253.150,00	1,00	19.222.300,00	1,00	17.362.335,38	1,00	18.230.452,14	1,00	19.141.974,75	1,00	20.099.073,49	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,00	41.162.630,00	3,00	45.140.000,00	3,00	59.357.025,00	3,00	50.130.675,00	3,00	52.637.208,75	3,00	55.269.069,19	3,00	58.032.522,65	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21,00	141.763.514,00	21,00	286.975.193,00	21,00	480.004.729,00	21,00	407.149.917,14	21,00	427.507.413,00	21,00	448.882.783,65	21,00	471.326.922,83	
	Jumlah publikasi kinerja skpd pada media massa	Termin	3,00		3,00		3,00		3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	-	-	1,00	8.111.850,00	1,00	8.966.725,00	1,00	9.489.052,13	1,00	9.963.504,73	1,00	10.461.679,97	1,00	10.984.763,97	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**	%	**98,32**	**13.645.167.844,00**	**98,45**	**15.512.874.875,00**	**98,84**	**18.211.385.100,00**	**99,05**	**18.395.377.468,18**	**99,12**	**18.895.146.341,58**	**99,16**	**19.839.903.658,67**	**99,25**	**21.024.002.226,50**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14,00	13.490.648.097,00	14,00	15.369.900.366,00	14,00	17.975.611.332,00	14,00	18.126.452.430,40	14,00	18.612.775.051,92	14,00	19.543.413.804,52	14,00	20.712.687.879,65	
	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14,00	-	14,00	-	14,00	-	14,00	-	14,00	-	14,00	-	14,00	-	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	68,00		73,00		100,00		150,00		200,00		250,00		300,00		

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2,00	17.558.800,00	2,00	15.074.675,00	2,00	33.470.975,00	2,00	23.268.317,63	2,00	24.431.733,51	2,00	25.653.320,18	2,00	26.935.986,19	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12,00	73.073.122,00	12,00	25.751.134,00	12,00	60.973.218,00	12,00	91.284.704,60	12,00	95.848.939,83	12,00	100.641.386,82	12,00	105.673.456,16	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	16.958.625,00	1,00	8.108.350,00	1,00	20.837.975,00	1,00	16.436.262,94	1,00	17.258.076,08	1,00	18.120.979,89	1,00	19.027.028,88	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	-	1,00	-	1,00	1.250.000,00	1,00	20.101.434,61	1,00	21.106.506,34	1,00	22.161.831,66	1,00	23.269.923,24	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14,00	35.268.100,00	14,00	84.320.925,00	14,00	102.163.500,00	14,00	102.168.592,31	14,00	107.277.021,93	14,00	112.640.873,03	14,00	118.272.916,68	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	11.661.100,00	2,00	9.719.425,00	2,00	17.078.100,00	2,00	15.665.725,69	2,00	16.449.011,97	2,00	17.271.462,57	2,00	18.135.035,70	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100,00**	**17.982.760,00**	**100,00**	**6.074.400,00**	**100,00**	**14.315.450,00**	**100,00**	**15.031.264,50**	**100,00**	**15.782.827,73**	**100,00**	**16.571.969,11**	**100,00**	**17.400.567,57**	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	17.982.760,00	1,00	6.074.400,00	2,00	14.315.450,00	2,00	15.031.264,50	2,00	15.782.827,73	2,00	16.571.969,11	2,00	17.400.567,57	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu**	%	**100,00**	**211.755.168,00**	**100,00**	**128.643.120,00**	**100,00**	**431.156.129,00**	**100,00**	**617.854.736,38**	**100,00**	**648.747.473,18**	**100,00**	**681.184.846,85**	**100,00**	**715.244.089,19**	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1,00	-	1,00	-	1,00	1.500.000,00	1,00	189.000.000,00	1,00	198.450.000,00	1,00	208.372.500,00	1,00	218.791.125,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	-	1,00	-	1,00	1.500.000,00	1,00	157.500.000,00	1,00	165.375.000,00	1,00	173.643.750,00	1,00	182.325.937,50	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12,00	204.780.168,00	12,00	126.461.270,00	12,00	163.958.129,00	12,00	223.237.805,18	12,00	234.399.695,43	12,00	246.119.680,21	12,00	258.425.664,22	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	10,00	6.975.000,00	10,00	2.181.850,00	10,00	12.448.000,00	10,00	4.777.518,38	10,00	5.016.394,29	10,00	5.267.214,01	10,00	5.530.574,71	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	98,00	-	98,00	-	98,00	150.000.000,00	98,00	13.400.956,41	98,00	14.071.004,23	98,00	14.774.554,44	98,00	15.513.282,16	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1,00	-	1,00	-	1,00	1.750.000,00	1,00	13.400.956,41	1,00	14.071.004,23	1,00	14.774.554,44	1,00	15.513.282,16	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1,00	-	1,00	-	1,00	100.000.000,00	1,00	16.537.500,00	1,00	17.364.375,00	1,00	18.232.593,75	1,00	19.144.223,44	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum**	**%**	**100,00**	**2.854.052.421,00**	**100,00**	**1.303.498.508,00**	**100,00**	**2.029.818.900,00**	**100,00**	**6.880.515.947,69**	**100,00**	**7.974.541.745,06**	**100,00**	**8.073.268.832,32**	**100,00**	**9.176.932.273,93**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	54.373.460,00	1,00	40.176.050,00	2,00	72.187.800,00	2,00	44.638.626,38	2,00	46.870.557,69	2,00	49.214.085,58	2,00	51.674.789,86	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	1.783.602.500,00	6,00	486.537.500,00	6,00	563.029.975,00	6,00	591.229.652,11	6,00	620.791.134,71	6,00	651.830.691,45	6,00	684.422.226,02	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4,00	54.523.220,00	4,00	82.017.108,00	4,00	87.740.225,00	4,00	89.401.339,13	4,00	93.871.406,08	4,00	98.564.976,39	4,00	103.493.225,21	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	114.463.072,00	2,00	126.156.850,00	2,00	165.283.250,00	2,00	139.087.927,13	2,00	146.042.323,48	2,00	153.344.439,66	2,00	161.011.661,64	
	Jumlah BBM yang tersedia	Liter	4.104,00		4.104,00		4.104,00		4.104,00	-	4.104,00	-	4.104,00	-	4.104,00	-	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	222.472.400,00	3,00	236.268.000,00	3,00	328.488.150,00	3,00	5.345.040.053,75	3,00	6.362.292.056,44	3,00	6.380.406.659,26	3,00	7.399.426.992,22	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	21,00	-	21,00	-	21,00	2.250.000,00	21,00	5.628.401,69	21,00	5.909.821,78	21,00	6.205.312,86	21,00	6.515.578,51	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	25,00	44.121.000,00	12,00	53.888.000,00	25,00	58.460.000,00	25,00	59.411.520,00	25,00	62.382.096,00	25,00	65.501.200,80	25,00	68.776.260,84	
	Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu dalam satu tahun	Porsi	3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00	-	3.600,00	-	3.600,00	-	3.600,00	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	563.125.189,00	12,00	270.570.000,00	12,00	737.045.000,00	12,00	597.385.215,00	12,00	627.254.475,75	12,00	658.617.199,54	12,00	691.548.059,51	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	8.974.980,00	1,00	2.875.000,00	1,00	7.711.000,00	1,00	3.169.687,50	1,00	3.328.171,88	1,00	3.494.580,47	1,00	3.669.309,49	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	8.396.600,00	1,00	5.010.000,00	1,00	7.623.500,00	1,00	5.523.525,00	1,00	5.799.701,25	1,00	6.089.686,31	1,00	6.394.170,63	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan**	**%**	**100,00**	**18.223.222.500,00**	**100,00**	**16.641.123.550,00**	**100,00**	**19.465.429.279,00**	**100,00**	**26.896.841.277,14**	**100,00**	**28.119.993.657,36**	**100,00**	**29.611.341.329,15**	**100,00**	**31.295.868.646,67**	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3,00	-	3,00	-	2,00	765.000.000,00	2,00	2.130.413.862,94	2,00	2.236.934.556,08	2,00	2.348.781.283,89	2,00	2.466.220.348,08	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	14.119.880.000,00	1,00	16.641.123.550,00	1,00	10.004.599.088,00	1,00	10.160.393.309,25	1,00	10.250.330.854,13	1,00	10.735.567.813,47	1,00	11.133.100.502,02	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	1.492.892.500,00	1,00	-	1,00	2.747.430.000,00	1,00	4.410.000.000,00	1,00	4.630.500.000,00	1,00	4.862.025.000,00	1,00	5.105.126.250,00	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3,00	44.200.000,00	3,00	-	3,00	672.438.250,00	3,00	1.668.642.999,98	3,00	1.752.075.149,97	3,00	1.839.678.907,47	3,00	1.931.662.852,85	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	-	1,00	-	1,00	1.973.379.750,00	1,00	336.000.000,00	1,00	352.800.000,00	1,00	370.440.000,00	1,00	388.962.000,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1,00	1.228.000.000,00	1,00	-	1,00	288.724.463,00	1,00	303.934.443,75	1,00	319.131.165,94	1,00	335.087.724,23	1,00	351.842.110,45	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	10,00	1.338.250.000,00	10,00	-	10,00	3.013.857.728,00	10,00	7.887.456.661,22	10,00	8.578.221.931,24	10,00	9.119.760.600,09	10,00	9.918.954.583,27	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100,00**	**1.830.437.089,00**	**100,00**	**1.841.277.527,00**	**100,00**	**2.161.682.676,00**	**100,00**	**2.081.654.438,85**	**100,00**	**2.185.737.160,79**	**100,00**	**2.295.024.018,83**	**100,00**	**2.409.775.219,77**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	3.310.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	7.473.600,00	1,00	5.512.500,00	1,00	5.788.125,00	1,00	6.077.531,25	1,00	6.381.407,81	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	-	1,00	919.742.223,00	1,00	999.500.000,00	1,00	1.008.772.766,19	1,00	1.059.211.404,50	1,00	1.112.171.974,72	1,00	1.167.780.573,46	
	Jumlah jasa komunikasi , air dan listrik yang dibayarkan	Bulan	12,00	841.924.301,00	12,00		12,00		12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	985.202.788,00	12,00	916.535.304,00	12,00	1.154.709.076,00	12,00	1.067.369.172,66	12,00	1.120.737.631,29	12,00	1.176.774.512,86	12,00	1.235.613.238,50	
	Jumlah Alat Kebersihan	Jenis	1,00		1,00		1,00		1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	
	Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibiayai	Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	
	Jumlah Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengamanan, Gedung Dinas	Orang	15,00		15,00		15,00		15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	
	Jumlah Jasa Keamanan Yang Tersedia	Orang	14,00		14,00		14,00		14,00	-	14,00	-	14,00	-	14,00	-	
	Jumlah jamuan makanan dan minuman rapat	Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah peserta olahraga	Orang	95,00		95,00		95,00		95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	
	Jumlah peserta pengajian	Orang	95,00		95,00		95,00		95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	
	Terlaksananya pembinaan mental dan rohani bagi aparatur Disdukcapil	Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik**	**%**	**100,00**	**1.151.175.200,00**	**100,00**	**3.629.007.879,00**	**100,00**	**2.658.446.000,00**	**100,00**	**4.506.618.556,60**	**100,00**	**4.731.949.484,43**	**100,00**	**4.968.546.958,65**	**100,00**	**5.216.974.306,58**	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48,00	284.886.700,00	48,00	326.780.000,00	48,00	396.000.000,00	48,00	409.887.450,00	48,00	430.381.822,50	48,00	451.900.913,63	48,00	474.495.959,31	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9,00	750.800.000,00	9,00	3.046.640.000,00	9,00	1.786.476.000,00	9,00	3.783.006.045,00	9,00	3.972.156.347,25	9,00	4.170.764.164,61	9,00	4.379.302.372,84	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030													KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	120,00	51.695.000,00	120,00	29.030.000,00	120,00	149.250.000,00	120,00	63.945.000,00	120,00	67.142.250,00	120,00	70.499.362,50	120,00	74.024.330,63	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8,00	63.793.500,00	8,00	226.557.879,00	8,00	326.720.000,00	8,00	249.780.061,60	8,00	262.269.064,68	8,00	275.382.517,91	8,00	289.151.643,80	
				57.172.432.464,00		**62.960.508.811,00**		**79.093.382.790,00**		**93.749.009.581,00**		**98.761.492.935,00**		**103.364.639.569,00**		**110.243.092.728,000**	

Dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan serangkaian sub kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025–2029. Seluruh sub kegiatan tersebut dituangkan secara sistematis dalam tabel 4.3 berikut:

TABEL 4. 3
SUB KEGIATAN PRIORITAS YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
			Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
			Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	
			Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	
			Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah I	
			Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah II	
			Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah III	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah IV	
			Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah V	
			Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah VI	
			Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah VII	
			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
			Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	
			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	
			Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	
2	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 1	
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 2	
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 3	
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 4	
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 5	
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 6	
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 7	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	
			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	
			Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	
			Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	
			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	
			Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	
			Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	
			Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	
			Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	
			Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
			Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	
			Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	
			Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	
			Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	
			Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam	
			Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
			Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	
			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyelenggaraan walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja berupa ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bogor menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor beserta target capaian dimaksud sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat dalam tabel 4.4 dan tabel 4.5 sebagai berikut:

TABEL 4. 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indikator Tujuan							
1	Cakupan Layanan Adminduk	%	78,50	80,75	81,74	84,17	85,70	87,63
	Indikator Sasaran							
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	78,50	80,75	81,74	84,17	85,70	87,63
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk	Poin	88,24	89,36	90,21	91,09	91,98	92,55

TABEL 4. 5
INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indikator Outcome Program								
1	Cakupan Penerbitan KTP	%	98,72	98,92	99,09	99,12	99,22	99,66	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	42,68	48,78	50,74	56,68	60,79	65,28	
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Anak	%	94,09	94,54	95,40	96,73	97,08	97,94	
4	Persentase Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	%	83,33	85,71	90,48	91,67	96,00	96,67	
6	Persentase data profil kependudukan yang tersaji	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BAB V

PENUTUP

Demikian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025- 2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama lima tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2025- 2030 sebagai implementasi kewenangan bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tahun rencana. Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

BUPATI BOGOR,

RUDY SUSMANTO

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rumus Hitung Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	TUJUAN										
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Adminduk	%	Jumlah Kumulatif Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan ---------- x 100% Jumlah Jenis Dokumen Utama Administrasi Kependudukan	(3855018/3905018+700090/1640150+1793310/1906017)/3*100	(3940118/3983118+800098/1640150+1856017/1963198)/3*100	(4378228/4418228+920328/1813771+1930100/(1963198+60000))/3*100	(4486581/4526581+1060840/1871577+2015000/(1963198+120000))/3*100	(4598934/4634934+1172914/1929383+2032000/(1963198+130000))/3*100	(4727287/4743287+1297189/1987189+2055000/(1963198+135000))/3*100	
	SASARAN 1										
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	Jumlah Kumulatif Persentase Dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan sesuai standar pelayanan ---------- x 100% Jumlah Jenis Dokumen Utama Administrasi Kependudukan	(3855018/3905018+700090/1640150+1793310/1906017)/3*100	(3940118/3983118+800098/1640150+1856017/1963198)/3*100	(4378228/4418228+920328/1813771+1930100/(1963198+60000))/3*100	(4486581/4526581+1060840/1871577+2015000/(1963198+120000))/3*100	(4598934/4634934+1172914/1929383+2032000/(1963198+130000))/3*100	(4727287/4743287+1297189/1987189+2055000/(1963198+135000))/3*100	
	Program Pendaftaran Penduduk										
	OUTCOME PROGRAM										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KTP	%	Jumlah Kepemilikan KTP ---------- x 100% Jumlah Wajib KTP Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kemendagri	3855018/3905018*100	3940118/3983118*100	4378228/4418228*100	4486581/4526581*100	4598934/4634934*100	4727287/4743287*100	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Sudah Memiliki KIA ---------- x 100% Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun	700090/1640150*100	800098/1640150*100	920328/1813771*100	1060840/1871577*100	1172914/1929383*100	1297189/1987189*100	
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 1:										
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Yang Memenuhi Standar Pelayanan	Persentase Penyelesaian Pelayanan Pendaftaran Penduduk Yang Memenuhi Standar Pelayanan	%	Jumlah Kumulatif Persentase Penerbitan Dokumen Utama Pendaftaran Penduduk ---------- x 100% Jumlah Jenis Dokumen Utama Pendaftaran Penduduk	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	Jumlah Penduduk yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (Akumulasi dari data seluruh kabupaten/kota) ---------- x 100% Total Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP	371083/4123145*100	466527/4165422*100	563831/4207699*100	662996/4249976*100	764021/4292253*100	866906/4334530*100	
	SUB KEGIATAN										
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Jumlah orang hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Orang	Jumlah orang hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	630,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	73.130,00	76.795,00	76.795,00	76.795,00	76.795,00	76.795,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penyelesaian Masalah										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pendaftaran Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlasaksanany a Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	
	SUB KEGIATAN										
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Jumlah laporan hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Peristiwa Kependudukan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	389.560,00	626.675,00	626.675,00	626.675,00	626.675,00	626.675,00	
		Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan	Keping	Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan	116.285,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	
		Jumlah KIA	Keping	Jumlah KIA	116.285,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	
		Jumlah KK	Lembar	Jumlah KK	30.975,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		Jumlah Perekaman KTP elektronik	Jiwa	Jumlah Perekaman KTP elektronik	124.425,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
		Jumlah SKTT	Lembar	Jumlah SKTT	1.590,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	Jumlah laporan Pencatatan atas Peristiwa Kependudukan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah laporan Penerbitan dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	Jumlah laporan Penerbitan dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Dokumen	Jumlah dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 2:										
	Meningkatnya Dukungan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyediaan dukungan pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	Jumlah Penyediaan Dukungan Pelayanan Pendaftaran Penduduk ---------- x 100% Jumlah Kebutuhan Dukungan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SUB KEGIATAN										
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SUB KEGIATAN										
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Dokumen	Jumlah dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 3:										
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Yang Memenuhi Standar Pelayanan pada 7 UPT	Presentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk pada 7 UPT	%	Jumlah Kumulatif Persentase Penerbitan Dokumen Utama Pendaftaran Penduduk Pada UPT ---------- x 100% Jumlah UPT	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	
	SUB KEGIATAN										
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah I										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada UPT Wilayah I	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	28.400,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah II										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada UPT Wilayah II	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	28.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah III										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada UPT Wilayah III	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	28.400,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah IV										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada UPT Wilayah IV	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	28.400,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah V										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada UPT Wilayah V	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	28.400,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah VI										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada UPT Wilayah VI	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	28.400,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk UPT Wilayah VII										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk pada UPT Wilayah VII	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	28.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	SUB KEGIATAN										
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pendaftaran Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Dokumen	Jumlah Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	Jumlah laporan hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pendaftaran Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	Dokumen	Jumlah Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 4:										
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan layanan pendaftaran penduduk yang terselenggara ---------- x 100% Jumlah target lokasi pembinaan dan pengawasan layanan pendaftaran penduduk	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pembinaan dan Pengawasan terkait										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pendaftaran Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendataran Penduduk	Laporan	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendataran Penduduk	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
	SUB KEGIATAN										
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	Jumlah laporan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Program Pencatatan Sipil										
	OUTCOME PROGRAM										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Anak	%	Jumlah Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran ---------- x 100% Jumlah Anak 0-18 Tahun	1793310/1906017*100	1856017/1963198*100	1930100/(1963198+60000)*100	2015000/(1963198+120000)*100	2032000/(1963198+130000)*100	2055000/(1963198+135000)*100	
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 5:										
	Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Memenuhi Standar Pelayanan	Persentase Penyelesaian Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Memenuhi Standar Pelayanan	%	Jumlah Kumulatif Persentase Penerbitan Dokumen Utama Pencatatan Sipil ---------- x 100% Jumlah Jenis Dokumen Utama Pencatatan Sipil	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	
		Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	Akta perkawinan yang diterbitkan ---------- x 100% Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa Perkawinan yang tercatat dan melaporkan	1099/1099*100	1241/1241*100	1383/1383*100	1525/1525*100	1667/1667*100	1809/1809*100	
		Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	Akta perceraian yang diterbitkan ---------- x 100% Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa perceraian yang tercatat dan melaporkan	118/118*100	132/132*100	146/146*100	160/160*100	174/174*100	188/188*100	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SUB KEGIATAN										
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	995,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	
		Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	Akta	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	810,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
		Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	Akta	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	65,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Jumlah akta Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan anak yang diterbitkan	Akta	Jumlah akta Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan anak yang diterbitkan	120,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
	SUB KEGIATAN										
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Layanan	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	58.422,00	67.852,00	67.852,00	67.852,00	67.852,00	67.852,00	
		Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	Akta	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	57.850,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00	
		Jumlah akta kematian yang diterbitkan	Akta	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	570,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Kependuduk	Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Kependudukan Yang Tersusun	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		an Yang Tersusun									
	SUB KEGIATAN										
	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	terkait Pencatatan Sipil										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Paket	Jumlah dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 6:										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Memenuhi Standar Pelayanan pada 7 UPT	Persentase Penyelesaian Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Memenuhi Standar Pelayanan pada 7 UPT	%	Jumlah Kumulatif Persentase Penerbitan Dokumen Utama Pencatatan Sipil Pada UPT ---------- x 100% Jumlah UPT	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	
		Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	Akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang Melaporkan ---------- x 100% Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	51176/51176*100	53622/53622*100	56068/56068*100	58514/58514*100	60960/60960*100	63406/63406*100	
		Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	Akta kematian yang diterbitkan ---------- x 100% Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan	14101/14101*100	15919/15919*100	17737/17737*100	19555/19555*100	21373/21373*100	23191/23191*100	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota	Laporan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 1										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada UPT Wilayah I	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	12.717,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 2										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada UPT Wilayah II	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	14.669,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 3										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada UPT Wilayah III	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	20.151,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 4										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada UPT Wilayah IV	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	15.925,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
		Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 5										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada UPT Wilayah V	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	15.399,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 6										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada UPT Wilayah VI	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	14.937,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil UPT 7										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada UPT Wilayah VII	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	19.520,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Jumlah laporan hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Jumlah dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri terkait Pencatatan Sipil	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	Jumlah laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
	SUB KEGIATAN										
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil	Orang	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Laporan	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Terkait Pencatatan Sipil									
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 7:										
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan layanan pencatatan sipil yang terselenggara ---------- x 100% Jumlah target lokasi pembinaan dan pengawasan layanan pencatatan sipil	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	
	SUB KEGIATAN										
	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan,										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan layanan pencatatan sipil yang terselenggara ---------- x 100% Jumlah target lokasi pembinaan dan pengawasan layanan pencatatan sipil	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
	SUB KEGIATAN										
	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kependudukan terkait Pencatatan Sipil										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan	Laporan	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Sipil yang Dilaksanakan									
	SUB KEGIATAN										
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SASARAN 2										
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminitsrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adminduk	Poin	Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter ---------- x Bobot Total Parameter Yang Terisi	88,24	89,36	90,21	91,09	91,98	92,55	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
	OUTCOME PROGRAM										
	Meningkatnya Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Laporan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Kependudukan Yang Tersedia ---------- x 100% Laporan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Kependudukan Yang Dibutuhkan	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	%	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama ---------- x 100% Jumlah Perangkat Daerah yang berpotensi memanfaatan data kependudukan	17,5/21*100	18/21*100	19/21*100	22/24*100	24/25*100	29/30*100	
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 8:										
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan ---------- x 100% Jumlah OPD	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	
	SUB KEGIATAN										
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
		Jumlah Pengolahan dan Penyajian NIK/Data yang tertangani	Data	Jumlah Pengolahan dan Penyajian NIK/Data yang tertangani	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	SUB KEGIATAN										
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Jumlah dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Jumlah Instansi Pengguna Pemanfaatan Data Kependudukan yang terlayani	Instansi	Jumlah Instansi Pengguna Pemanfaatan Data Kependudukan yang terlayani	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
	SUB KEGIATAN										
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 8:										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	Jumlah Penyediaan Dukungan Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ---------- x 100% Jumlah Kebutuhan Dukungan Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	
	SUB KEGIATAN										
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 9:										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	Jumlah Dukungan Jaringan dan Sistem Informasi Aplikasi Yang Terfasilitasi ---------- x 100% Jumlah Lokasi Pelayanan	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	
	SUB KEGIATAN										
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	Dokumen	Jumlah dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penyelenggaraan Pemanfaatan										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Data Kependudukan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
	SUB KEGIATAN										
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	448,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil	Kali	Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil	45,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	
		Jumlah Sosialisasi Radio / TV	Kali	Jumlah Sosialisasi Radio / TV	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
		Jumlah Poster	Buah	Jumlah Poster	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
		Jumlah Standing Banner	Buah	Jumlah Standing Banner	120,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
	SUB KEGIATAN										
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen	Jumlah dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	115.000	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 10:										
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terselenggara ---------- x 100% Jumlah target lokasi pembinaan dan pengawasan layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
	SUB KEGIATAN										
	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SUB KEGIATAN										
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan										
	OUTCOME PROGRAM										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Penyajian Profil Kependudukan sesuai ketentuan	Persentase data profil kependudukan yang tersaji	%	Jumlah Profil Kependudukan Yang Sesuai Dengan Pedoman Penyusunan ---------- x 100% Jumlah Profil Kependudukan Yang Diterbitkan	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	100/12*12	
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 11:										
	Meningkatnya Kualitas Buku Profil Kependudukan	Persentase Buku Profil Kependudukan yang Akurat dan Mutakhir	%	Jumlah Profil Kependudukan Yang Akurat dan Mutakhir ---------- x 100% Jumlah Buku Profil Kependudukan	1/1*100	1/1*100	1/1*100	1/1*100	1/1*100	1/1*100	
	SUB KEGIATAN										
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah data Kependudukan Kabupaten/Kota	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
	OUTCOME PROGRAM										
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Hasil Penilaian dari Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perangkat Daerah										
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 12:										
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD ---------- x 100 Jumlah Pegawai	30/30*100	30/30*100	30/30*100	30/30*100	30/30*100	30/30*100	
	SUB KEGIATAN										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan	Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah									
	SUB KEGIATAN										
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	SUB KEGIATAN										
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
		Jumlah publikasi kinerja skpd pada media massa	Termin	Jumlah publikasi kinerja skpd pada media massa	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SUB KEGIATAN										
	Penyelenggaraan walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 13:										
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	Jumlah Realisasi anggaran / Jumlah anggaran * 100	59203508114/60135610070*100	59203508114/59898328727*100	59203508114/59771335804*100	59203508114/59729124409*100	59203508114/59705030369*100	59203508114/59650889787*100	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
		Jumlah Pengelolaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 14:										
	Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	Barang Milik Daerah yang Tercatat ---------- x 100 Jumlah Barang Milik Daerah	32/32*100	32/32*100	32/32*100	32/32*100	32/32*100	32/32*100	
	SUB KEGIATAN										
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 15:										
	Terpenuhinya Layanan Kepegawaian	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani Tepat Waktu ---------- x 100 Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani	4/4*100	4/4*100	4/4*100	4/4*100	4/4*100	4/4*100	
	SUB KEGIATAN										
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
	SUB KEGIATAN										
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 16:										
	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	Layanan Administrasi Umum yang Terselesaikan Tepat Waktu ---------- x 100 Layanan Administrasi Umum yang Terselesaikan	24/24*100	24/24*100	24/24*100	24/24*100	24/24*100	24/24*100	
	SUB KEGIATAN										
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
		Jumlah BBM yang tersedia	Liter	Jumlah BBM yang tersedia	4.104,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SUB KEGIATAN										
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
	SUB KEGIATAN										
	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
		Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu	Porsi	Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu dalam satu tahun	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		dalam satu tahun									
	SUB KEGIATAN										
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SUB KEGIATAN										
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 17:										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi sesuai dengan Ketentuan ---------- x 100 Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana	32/32*100	32/32*100	32/32*100	32/32*100	32/32*100	32/32*100	
	SUB KEGIATAN										
	Pengadaan Mebel										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Paket	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pengadaan Gedung Kantor										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	atau Bangunan Lainnya										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Unit	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 18:										
	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi ---------- x 100 Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32/32*100	32/32*100	32/32*100	32/32*100	32/32*100	32/32*100	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	SUB KEGIATAN										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Jumlah jasa komunikasi , air dan listrik yang dibayarkan	Bulan	Jumlah jasa komunikasi , air dan listrik yang dibayarkan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
		Jumlah Alat Kebersihan	Jenis	Jumlah Alat Kebersihan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibiayai	Bulan	Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibiayai	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
		Jumlah Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengamanan, Gedung Dinas	Orang	Jumlah Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengamanan, Gedung Dinas	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
		Jumlah Jasa Keamanan Yang Tersedia	Orang	Jumlah Jasa Keamanan Yang Tersedia	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Jumlah jamuan makanan dan minuman rapat	Bulan	Jumlah jamuan makanan dan minuman rapat	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
		Jumlah peserta olahraga	Orang	Jumlah peserta olahraga	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
		Jumlah peserta pengajian	Orang	Jumlah peserta pengajian	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
		Terlaksananya pembinaan mental dan rohani bagi aparatur Disdukcapil	Bulan	Terlaksananya pembinaan mental dan rohani bagi aparatur Disdukcapil	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	GRAND OUTPUT KEGIATAN 19:										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara ---------- x 100 Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dimiliki	32/32*100	32/32*100	32/32*100	32/32*100	32/32*100	32/32*100	
	SUB KEGIATAN										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	OUTPUT SUB KEGIATAN										
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
	SUB KEGIATAN										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
	SUB KEGIATAN										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	FORMULASI TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	